

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN

Bab ini membahas rencana Pengembangan pada saat pra, penyelenggaraan dan Pasca PON XX

6.1. Visi dan Misi Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi XX

Dengan dasar hasil kesepakatan penentuan cabang olahraga dan venue masing–masing maka kami merekomendasikan dasar perencanaan yang akan di laksanakan untuk mendukung penyelenggaraan PON XX di PAPUA.

Bila dikaitkan dengan gambaran realitas pengembangan infrastruktur dan ekonomi dalam konteks penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua, maka perumusan visi-misi pengembangan infrastruktur dan ekonomi PON XX di Provinsi Papua, dapat diuraikan sebagai berikut :

6.1 Visi

“Terwujudnya pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah untuk mendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya menjadikan Papua sebagai pusat pembinaan dan pendidikan olah raga prestasi internasional di Indonesia Timur dan Rumpun Melanesia”.

6.2 Misi

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) misi yang dirumuskan sebagai bentuk perwujudan langkah perencanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan Visi dari Pengembangan Infrastruktur dan ekonomi PON Papua Tahun 2020.

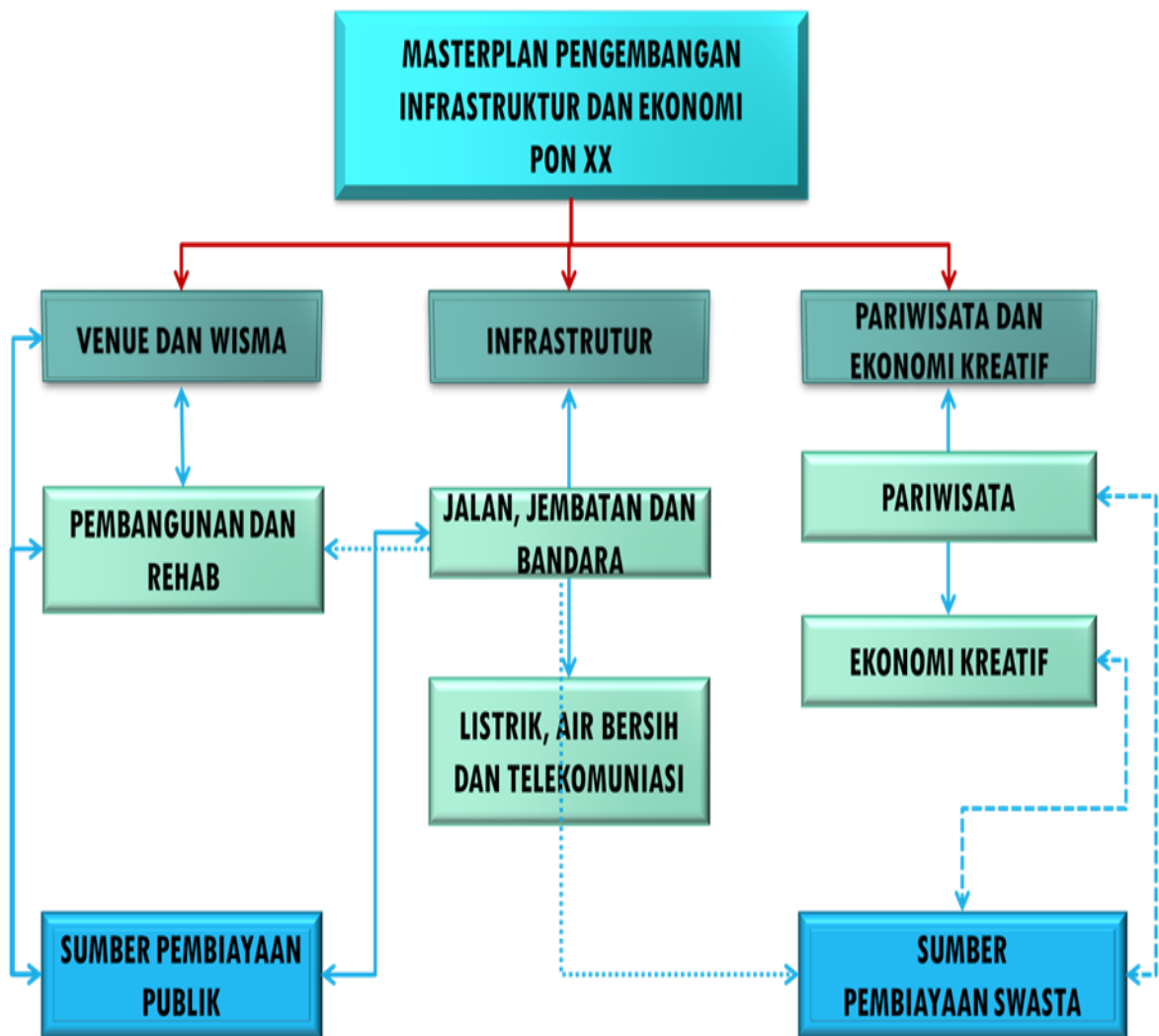
- Misi 1 : Mengembangkan Infrastruktur Olah Raga dan Infrastruktur wilayah pendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua.
- Misi 2 : Mengembangkan perekonomian wilayah dan pariwisata daerah.
- Misi 3 : Mewujudkan upaya pemanfaatan aset dan kelembagaan pengelolaan aset pasca PON XX di Provinsi Papua.

6.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi PON XX

Berdasarkan Visi-Misi yang telah dirumuskan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan kebijakan dari masing-masing misi yang telah dirumuskan untuk memberikan arahan tindakan yang harus ditetapkan dalam upaya pencapaian visi dari pengembangan infrastruktur dan ekonomi PON XX.

Rumusan kebijakan pengembangan infrastruktur dan ekonomi PON XX akan menjadi dasar dalam menentukan strategi perwujudan rencana, yang selanjutnya menjadi acuan untuk indikasi program dan implementasi kegiatan.

Pada tabel berikut dapat dilihat rumusan visi, misi, kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur dan ekonomi PON XX di Provinsi Papua.



Gambar 6.1 SKEMA MASTERPLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI PON XX

Tabel 6.1 Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Ekonomi PON XX di Provinsi Papua

VISI: “Terwujudnya pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah untuk mendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya menjadikan Papua sebagai pusat pembinaan dan pendidikan olah raga prestasi internasional di Indonesia Timur dan Rumpun Melanesia”		
MISI	KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 1 Mengembangkan Infrastruktur Olah Raga dan Infrastruktur wilayah pendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua	Pengembangan Infrastruktur Olah Raga sesuai Cabang Olah Raga PON yang akan dipertandingkan sesuai standar nasional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pembangunan Venue Utama PON XX di Prov Papua 2. Mewujudkan pembangunan venue baru yang belum tersedia sesuai kebutuhan penyelenggaraan cabang olahraga yang dipertandingkan 3. Melakukan rehabilitasi dan/renovasi venue eksisting sesuai standar nasional dan internasional
	Pengembangan Infrastruktur/Prasarana Wilayah dan sarana penunjang penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan jaringan infrastruktu/ prasarana transportasi menghubungkan Kota dan Kabupaten Jayapura sebagai lokasi Venue Utama PON XX 2. Meningkatkan kemandirian suplai listrik dan penyediaan air bersih terutama pada lokasi venue penyelenggaraan PON XX 3. Mengembangkan arsitektural bangunan prasarana dengan memperhatikan nilai arsitektural lokal di 5 Wilayah Adat Papua (Mamta, Saereri, Ha Anim, La Pago, Mee Pago)
Misi 2 Mengembangkan perekonomian wilayah dan pariwisata daerah	Pengembangan kegiatan ekonomi kreatif dan objek wisata yang mudah diakses dari lokasi Venue PON XX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Sentra-Sentra Kegiatan Ekonomi Kreatif yang Memproduksi Oleh-Oleh / Buah Tangan Khas Papua, pada lokasi yang masih mudah ditempuh dari lokasi Venue maupun Akomodasi Rombongan PON XX 2. Meningkatkan aksesibilitas dari pusat kota (lokasi akomodasi rombongan PON XX) ke lokasi obyek wisata dan ekonomi kreatif Papua 3. Memanfaatkan Akses dari Bandara ke Akomodasi maupun Venue sebagai Etalase Produk Ekonomi Kreatif Papua dan Potensi Obyek Wisata di Papua 4. Mewujudkan pembangunan titik (<i>node</i>) aglomerasi etalase ekonomi kreatif dilengkapi dengan pusat informasi sekaligus agen transportasinya
	Pengembangan wisata alam dan budaya di sekitar lokasi venue PON XX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Obyek-Obyek Wisata di lokasi yang masih mudah ditempuh dari lokasi Venue maupun akomodasi rombongan PON XX 2. Peningkatan Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Berbasis Kampung yang diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur dan pemaketan pemasaran wisata 3. Meningkatkan kualitas pelayanan atraksi wisata dan <i>amenities</i> wisata pada obyek wisata

VISI: “Terwujudnya pengembangan infrastruktur dan ekonomi wilayah untuk mendukung penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya menjadikan Papua sebagai pusat pembinaan dan pendidikan olah raga prestasi internasional di Indonesia Timur dan Rumpun Melanesia”		
MISI	KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 3 Mewujudkan upaya pemanfaatan aset dan kelembagaan pengelolaan aset pasca PON XX di Provinsi Papua	Pemanfaatan aset venue utama PON XX sebagai upaya memajukan prestasi Olah Raga di Provinsi Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemanfaatan venue pasca PON XX sebagai pusat pembinaan dan pendidikan olah raga prestasi di Provinsi Papua. 2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan/event Olah Raga Besar Nasional/ Internasional dalam kalender tetap (periodik) dengan memanfaatkan Venue-Venue pasca PON 3. Mendirikan Universitas Olahraga Prestasi Internasional di Papua tidak jauh dari lokasi Venue utama PON, yang diberi kemudahan/akses pemanfaatan aset Olah Raga di Papua
	Pengembangan kelembagaan pengelolaan aset pasca PON XX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan UPT Khusus untuk pengelolaan Prasarana Olahraga yang mandiri dengan kategori <i>Cost Recovery</i> rendah 2. Perwujudan kerjasama dengan Swasta, untuk pengelolaan aset Olah Raga/ Penunjang dengan kategori <i>Cost Recovery</i> tinggi dan sifat pengelolaannya membutuhkan tingkat profesionalitas dan kemampuan teknis tinggi 3. Pembentukan Koperasi/Paguyuban masyarakat untuk aset Wisata dan Penunjang wisata dan/ olah raga yang sifat pengelolaannya masih sederhana dengan <i>Cost Recovery</i> kategori sedang sampai tinggi

Sumber: Hasil Analisis & Kajian, 2015

6.4 Kebijakan Tata Ruang

6.5.1. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Kebijakan pengembangan struktur ruang Provinsi Papua meliputi:

- a. Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan yang berkembang secara berimbang dan berjenjang (hirarkis), sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendukung peran pusat pelayanan.

Peningkatan peran kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Memantapkan peran pusat-pusat pelayanan yang sudah berkembang, dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan baru yang melayani wilayah bagian tengah.
- b. Mengakomodasi eksistensi perkampungan sebagai representasi keberadaan masyarakat.
- c. Meningkatkan aksesibilitas antar pusat pelayanan, dan antara pusat pelayanan dengan wilayah yang dilayani.

Sedangkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendukung peran pusat pelayanan dilakukan melalui strategi:

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi dengan prioritas transportasi sungai, danau, laut, dan udara
- b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi
- c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik
- d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Rencana struktur ruang wilayah meliputi sistem perkotaan dan perkampungan, sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi untuk :

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan terhadap nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota,
2. Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan,
3. Mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang,
4. Pertimbangan dalam menyusun indikasi program utama RTRW Provinsi,
5. Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah Provinsi.

Kawasan strategis Provinsi ditetapkan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi,
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan,
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan,
4. Daya dukung dan daya tampung wilayah Provinsi, dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis Provinsi ditetapkan dengan kriteria :

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah Provinsi yang memiliki kekhususan,
2. Memperhatikan kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Provinsi,
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas,
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
 - b. diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan; atau
 - c. merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
5. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten. Nilai strategis ekonomi yang dimaksud adalah terdapatnya aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. potensi ekspor;
 - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energy; atau
 - h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

6. Merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan :
 - a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki :
 - a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. sumber daya alam strategis;
 - c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;
 - d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain :
 - a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. kawasan rawan bencana alam; atau
 - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

9. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah Provinsi , dan

10. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang,

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing Provinsi. Kawasan strategis yang ada di Provinsi memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional. Penetapan kawasan strategis Provinsi didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dalam skala provinsi, kawasan strategis ekonomi ditentukan pada:

- a. Wilayah Pegunungan Tengah:
 - o Bagian Timur meliputi Kabupaten Yahukimo dan Peg. Bintang.
 - o Bagian Tengah meliputi Kabupaten Nduga, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Puncak Jaya.
 - o Bagian Barat meliputi Kabupaten Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai
- b. Mamberamo-Sarmi.
- c. Kawasan Merauke dan sekitarnya

B. Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.

Untuk skala Provinsi Papua kawasan strategis sosial budaya pada skala provinsi ditentukan pada wilayah :

- a. Asmat-Timika Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mimika
- b. Wamena Kabupaten Jayawijaya
- c. Sentani Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura
- d. wilayah Maudori di Kabupaten Supiori

C. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup skala provinsi ditentukan pada wilayah:

- a. Pantai Utara dan kepulauan, yang merupakan wilayah rawan multi bencana, mencakup Kabupaten Nabire, Dogiyai, Waropen, Biak, Kepulauan Yapen, Supiori, Sarmi, Jayapura, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura.
- b. Pegunungan Tengah, yang merupakan wilayah rawan multi bencana gempa, banjir, longsor, kekeringan.
- c. Bagian Selatan, yang merupakan wilayah rawan multi bencana, wilayah bergambut dengan ketebalan >300 cm, wilayah hutan mangrove, meliputi Kabupaten Asmat, Mimika, Mappi, Boven Digoel, dan Merauke.

6.5 Rencana Pengembangan Venue

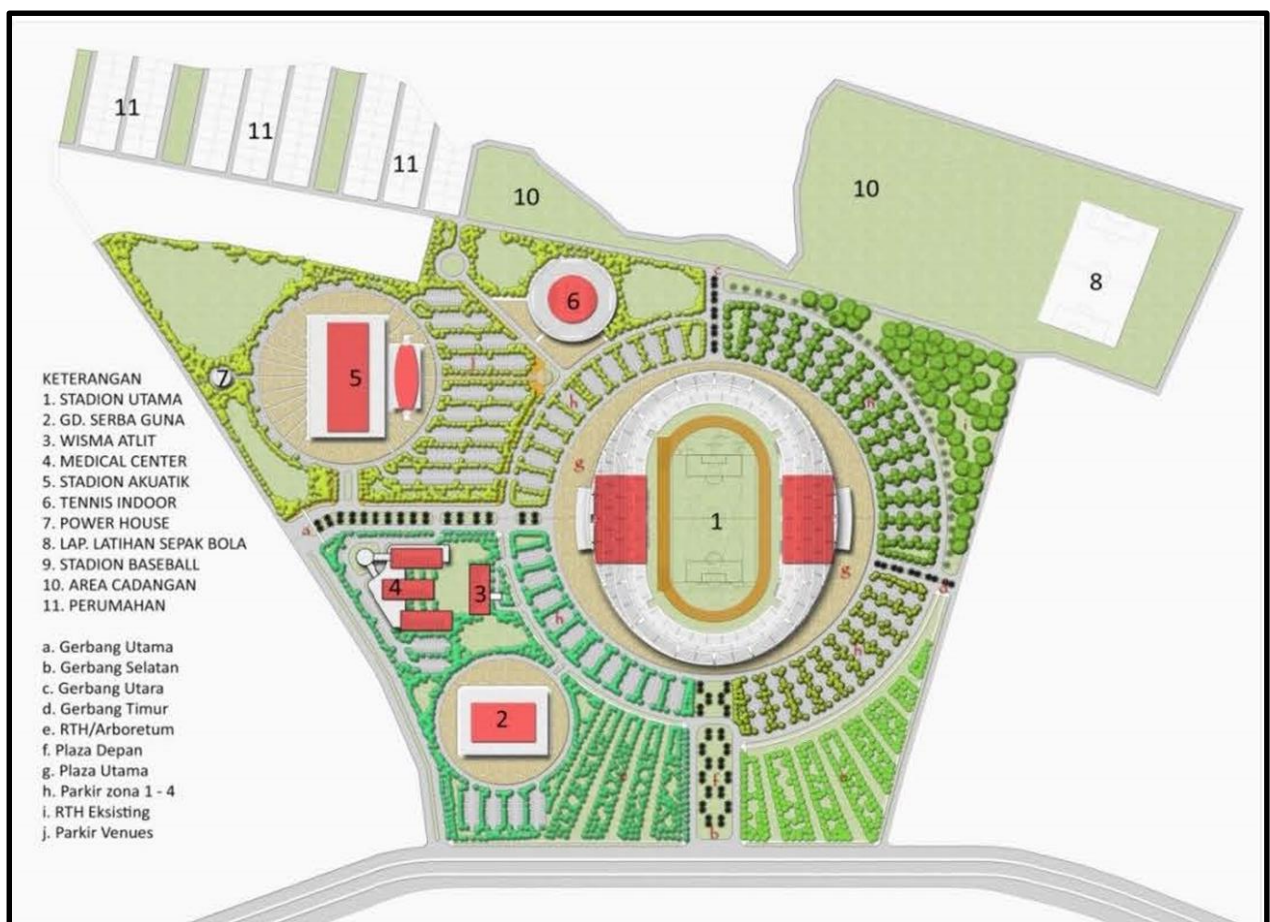
Setelah mempertimbangkan penyebaran pembangunan dan pemerataan infrastruktur maka telah ditetapkan penyebaran venue untuk kesiapan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua. Dengan memenuhi persyaratan dan dari pertimbangan untuk penyelenggaraan dari hasil forum bersama PB PON dan ketua cabang olahraga yang ada di Papua, pembagian menurut Cluster tetap diadopsi dan di maksudkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah budaya adat yang ada di Papua. Wilayah budaya tersebut mencakup, MAMTA, SAIRERI, LAPAGO, MEEPAGO dan ANIMHA. Dan lima kawasan pengembangan dan disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas olahraga, aksesibilitas, akomodasi, serta fasilitas pendukung lain.

6.6.1 Rencana Pengembangan Venue Utama Kawasan Kampung Harapan

Pada Forum Pemilihan Venue Utama tanggal 1 Oktober 2015 yang bertempat di Sasan Karya Kantor Gubernur PAPUA yang di hadiri Gubernur PAPUA sebagai Pemegang Kekeuasaan yaitu Gubernur dan sebagai Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga XX di PAPUA, para Satuan Kerja Pemerintah daerah , dan pengurus besar panitia PON XX, telah menetapkan Kampung Harapan menjadi lokasi untuk Venue utama.

Dengan mempertimbangkan pengembangan daerah tersebut dan luasan yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua maka direncanakan pembangunan yang akan di laksanakan di Kampung Harapan bias di lihat dari Site plan berikut :

Rencana Site Plan Venue Utama



Tabel 6.2 Rekap Cabang Olahraga dan Venue

No	Cabang Olahraga	Venue	Cluster
1	AEROSPORT / DIRGANTARA		
	• Aeromodeling	Bandara Frans Kaisiepo	Kabupaten Biak Numfor
	• Gantole	Koya Koso	Kota Jayapura
	• Paralayang	Koya Koso	Kota Jayapura
	• Paramotor	Koya Koso	Kota Jayapura
	• Terbang Layang	Koya Koso	Kota Jayapura
	• Terjun Payung	Bandara Frans Kaisiepo	Kabupaten Biak Numfor
2	AKUATIK		
	• Renang	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
	• Renang Indah	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
	• Loncat Indah	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
	• Polo Air	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
	• Renang Perairan Terbuka	Pantai DOK II	Kota Jayapura
	• Selam Kolam	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
3	ANGGAR	Sport Hall Head Sai	Kabupaten Merauke
4	PABSI		
	• Angkat Besi	Ballroom Aston	Kota Jayapura
	• Angkat Berat	Ballroom Aston	Kota Jayapura
	• Binaraga	Ballroom Aston	Kota Jayapura
5	ATLETIK	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
6	SEPEDA		
	• Balap Sepeda	Jalan Raya Kemiri	Kabupaten Jayapura
	• Sepeda BMX	Buper Waena	Kota Jayapura
	• Sepeda Gunung	Kawasan Hutan LIPI	Kabupaten Jayawijaya
	• Sepeda Track / Veodroom	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
7	BASEBALL / SOFTBALL		
	• Baseball	Komplek Uncen Waena	Kota Jayapura
	• Softball	Komplek Uncen Waena	Kota Jayapura
8	BERKUDA		
	• Balap Kuda	Sirkuit Taman Pinang	Kabupaten Merauke
	• Equestrian (Ketangkasan)	Sirkuit Taman Pinang	Kabupaten Merauke
9	BERMOTOR	Sirkuit Sumberker/Sirkuit Merauke	Kab. Biak Numfor/Kab. Mearuke
10	BILLIAR	GOR/Arena Billiard	Kabupaten Jayawijaya
11	BASKET	Kawasan Koya	Kota Jayapura
12	VOLI		
	• Voli Indoor	GOR Waringin	Kota Jayapura
	• Voli Pantai	Kalkhote	Kabupaten Jayapura

No	Cabang Olahraga	Venue	Cluster
13	BOWLING	Mall Timika	Kabupaten Mimika
14	BRIDGE	Ruang Rapat Aston	Kota Jayapura
15	BULUTANGKIS	Mimika Sport Kompleks	Kabupaten Mimika
16	CATUR	Ruang Rapat Aston	Kota Jayapura
17	CRIKET	Kompleks Uncen Waena	Kota Jayapura
18	DAYUNG		
	• Canoeing	Kalkhote / Danau Sentani	Kabupaten Jayapura
	• Rowing	Kalkhote / Danau Sentani	Kabupaten Jayapura
	• Tradional Boat	Kalkhote / Danau Sentani	Kabupaten Jayapura
19	DANSA	Sasana Krida	Kota Jayapura
20	DRUMBAND		
	• Drumband Indoor	Kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
	• Drum Band Outdoor	Jalan Kemiri	Kabupaten Jayapura
21	GOLF	Kuala Kencana Freeport	Kabupaten Mimika
22	GULAT	Mimika Sport Kompleks	Kabupaten Mimika
23	HOKEY		
	• Hoki Indoor	Hoki Indoor Stadium	Kabupaten Biak Numfor
	• Hoki Outdoor	Lapangan Hoki Ridge	Kabupaten Biak Numfor
24	JUDO	GOR Mandala	Kota Jayapura
25	KARATE	GOR Head Sai	Kabupaten Merauke
26	KEMPO	GOR SMAKOR	Kota Jayapura
27	LAYAR	Kep. Padaido	Kabupaten Biak Numfor
28	MENEMBAK	Rindam VIII	Kabupaten jayapura
29	PANAHAN	Mahacandra UNCEN Waena	Kota Jayapura
30	PANJAT TEBING	KODAM XVII Cenderawasih	Kota Jayapura
31	PENCAK SILAT	Auditorium UNCEN Abepura	Kota Jayapura
32	SELAM LAUT	Pantai DOK II	Kota Jayapura
33	SENAM	GOR Cenderawasih	Kota Jayapura
34	SEPAKBOLA		
	• Sepakbola (Penyisihan)	Stadion Barnabas Youwe	Kabupaten Jayapura
	• Sepakbola (Penyisihan)	Stadion Cenderawasih	Kabupaten Biak Numfor
	• Sepakbola (Penyisihan)	Stadion Wamena	Kabupaten Jayawijaya
	• Sepakbola (Semi Final)	Stadion Mandala	Kota jayapura
	• Sepakbola (Penyisihan)	Satdion Serui	Kabupaten Serui
	• Sepakbola (Final)	Stadion Utama Kp. Harapan	Kabupaten Jayapura
	• Futsal	Kawasan Koya	Kota Jayapura
35	SEPAK TAKRAW	GOR Toware	Kabupaten Jayapura
36	SEPATU RODA	Buper Waena	Kota jayapura
37	SKI AIR	Danau Sentani	Kabupaten Jayapura
38	SQUASH	Kuala Kencana Freeport	Kabupaten Mimika
39	TAEKWONDO	GOR Head Sai	Kabupaten Merauke
40	TENNIS MEJA	GOR Trikora	Kota Jayapura
41	TENNIS		
	• Tennis Indoor	POLDA PAPUA Bayangkara)	Kota Jayapura

No	Cabang Olahraga	Venue	Cluster
	• Tennis Outdoor	Komplek Walikota	Kota jayapura
42	PENCAK SILAT	Auditorium UNCEN Abepura	Kota jayapura
43	TINJU	Mimika Sport Kompleks	Kabupaten Mimika
	MUAY THAI	GOR Ukumerek	Kabupaten Jayawijaya
44	Wushu	GOR Mandala	Kota Jayapura

Tabel 6.3 Item Pembangunan dan Pengembangan Venue Utama

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Luasan	Satuan	Item
1	Komplek Kampung Harapan - Kab. Jayapura	Stadion Utama + Atletik	744,856	m2	Site
					Bangunan + Tribun
					Lapangan Rumput (Zoysia Martela)
					Track Atletik -Sintetis
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Penerangan
					Scoring Board
					Parkir
					RTH
					Pekerjaan Non Standard
2	Komplek Kampung Harapan - Kab. Jayapura	G.Serbaguna / Power House	35000	m2	Site
					Bangunan + Tribun
					Lapangan Parquet
					Peralatan (Matras)
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Scoring Board
					Parkir
					RTH
					Pekerjaan Non Standard
3	Komplek Kampung Harapan - Kab. Jayapura	Indoor Stadium	35000	m2	Site, Bagunan
					Lapangan Parquet
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Scoring Board
					Parkir + RTH
					Pekerjaan Non Standard

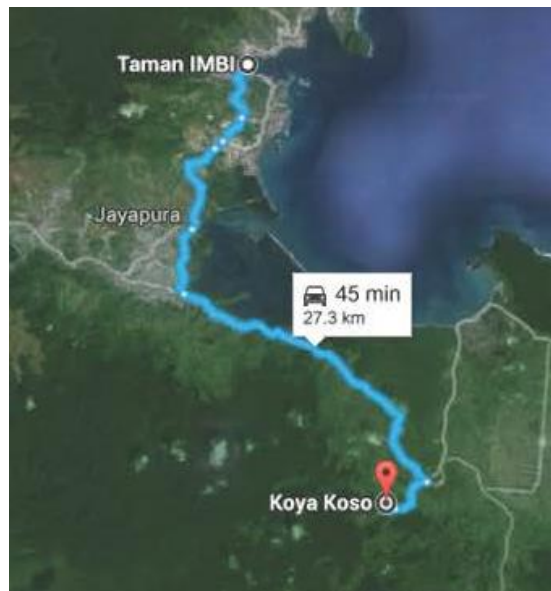
No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Luasan	Satuan	Item
4	Wisma - Atlit	Wisma 4 Lantai	3200	m2	Site
					Bangunan
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Parkir
					RTH
					Pengadaan Peralatan
					Pekerjaan Non Standard
5	Komplek Kampung Harapan - Kab. Jayapura	Wisma Berderet	6400	m2	Site
					Bangunan
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Parkir
					RTH
					Pengadaan Peralatan
					Pekerjaan Non Standard
6	Komplek Kampung Harapan - Kab. Jayapura	Medical Centre	12400	m2	Site
					Bangunan
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Parkir
					RTH
					Pengadaan Peralatan
					Pekerjaan Non Standard

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Luasan	Satuan	Item
7	Komplek Kampung Harapan - Kab. Jayapura	Stadium Aquatik	54,750	m2	Site
					Bangunan + Tribun
					Kolam Tanding
					Kolam Pemanasan
					Kolam Polo Air
					Kolam Senam Indah + Loncat Indah
					Kolam Selam
					Peralatan Renang
					Instalasi Listrik
					Instalasi Air
					Penerangan
					Scoring Board
					Parkir
					RTH
					Pekerjaan Non Standard

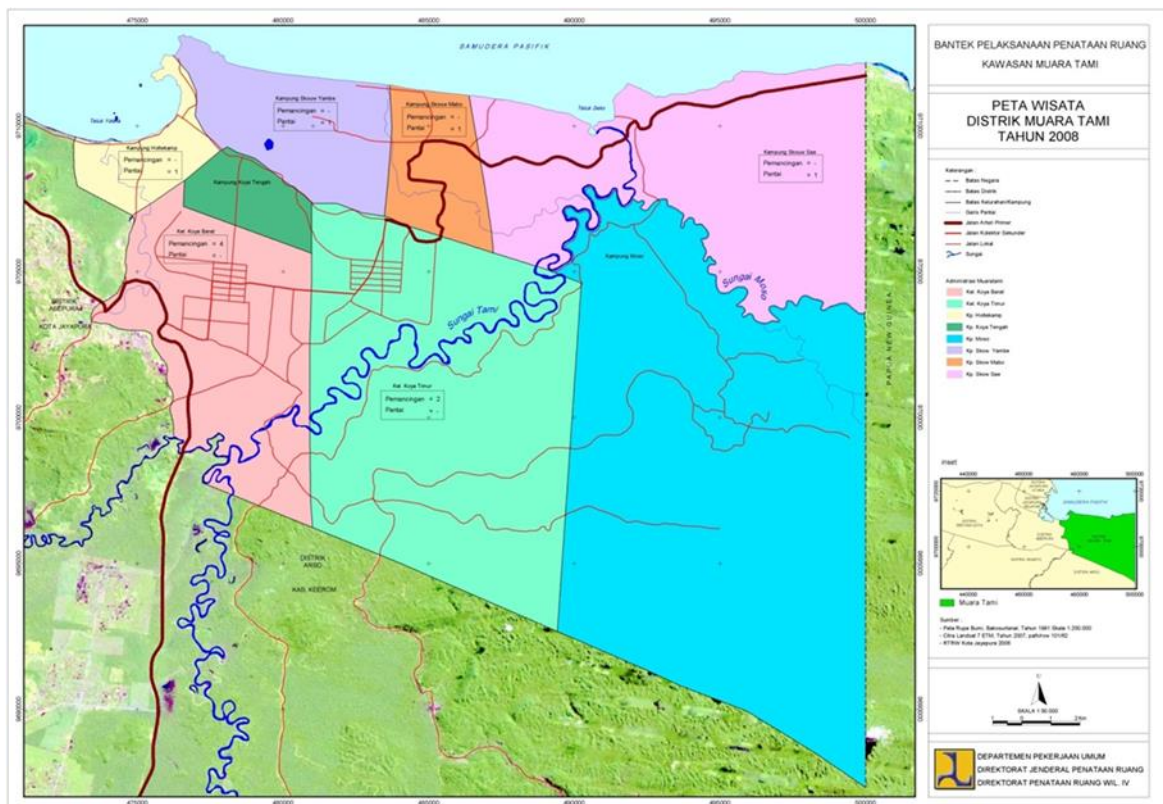
Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.2 Kawasan Koya

Selain kawasan Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura ada pula Kawasan yang direncanakan untuk pengembangan Olahraga menuju PON XX Papua, yaitu pada kawasan Koya yang berada di Kota Jayapura, kawasan ini berjarak 27,3 KM dari pusat Kota Jayapura atau dengan waktu tempuh sekira 45 menit.

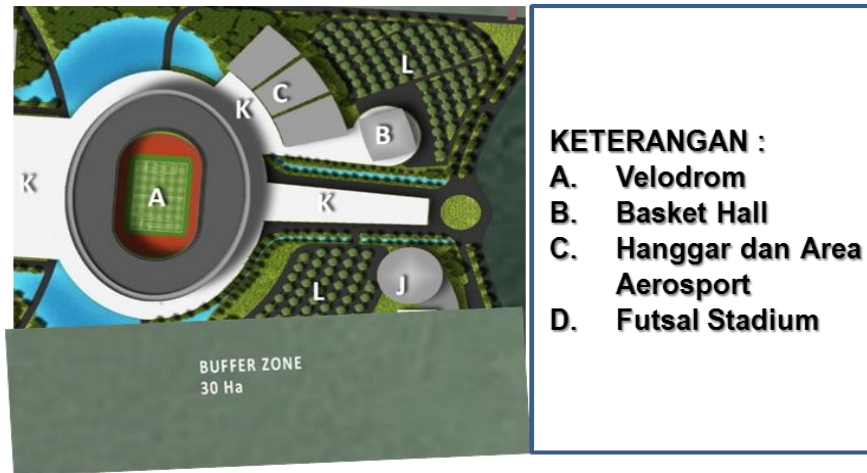


Gambar 6.2 Kawasan Koya



Gambar 6.3 Kawasan Koya

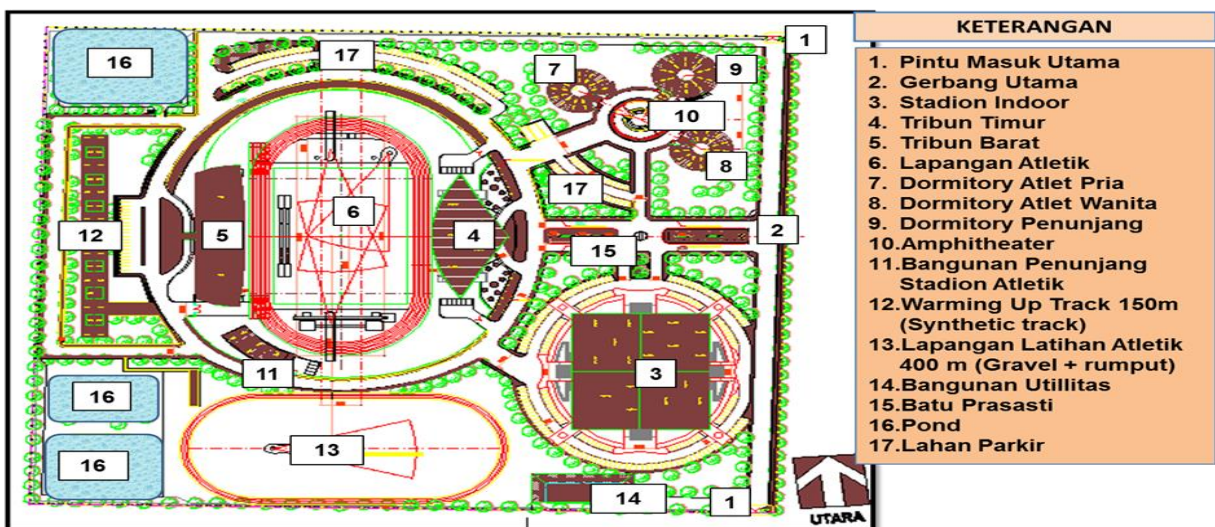
Pada Kawasan Koya ini rencana pengembangan yang akan di bangun adalah beberapa venue untuk menampung dan mempertandingkan beberapa cabang olahraga seperti sepeda trek (velodroom), basket hall, futsal stadium dan arena sport dirgantara untuk paralayang, paramotor, terbang laying dan gantole.



Gambar 6.4 Denah Rencana Kawasan Koya

6.6.3 Kawasan Mimika Sport Complexs

Kawasan yang terletak di Kabupaten Mimika tepatnya dekat dengan tembaga pura Kota Timika, telah di bangun kawasan olahraga selain untuk mewujudkan cita – cita Papua sebagai tuan rumah PON XX, kompleks olahraga ini dimaksydkan untuk memperkaya khasanah perolahragaan bagi warga sekitar. Kompleks tersebut berada sekitar 1,2 KM dari pusat Kota Timika atau dengan waktu tempuh 3 menit.



Gambar 6.5 Denah Rencana Kawasan Koya

6.6.4 Rencana Pengembangan Venue pada tiap Cluster

Pada PON XX di Papua ini telah di sepakati pada Forum Pembahasan Lapaoran Antara Master Plan Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi PON XX pembagian cabang olahraga dan venue terkait olahraga tersebut. Terdapat satu Kota dan 5 Kabupaten yang menyebar di lima besar Wilayah Budaya Adat Papua, yakni :

1. Kota Jayapura
2. Kabupaten Jayapura
3. Kabupaten Mimika
4. Kabupaten Biak Numfor
5. Kabupaten Merauke
6. Kabupaten Jayawijaya

Tabel 6.4 Rekap Item Per Kegiatan Venue Lainnya

No	Lokasi / Kegiatan	Cabor	Venue
1. PEMBANGUNAN BARU			
	Kota Jayapura	Gantole, Paralayang, Paramotor, dan Terbang Layang	Kawasan Koya
	Kota Jayapura	Basket Ball	Kawasan Koya
	Kota Jayapura	Velodroom (Sepeda Track)	Kawasan Koya
	Kota Jayapura	Futsal	Kawasan Koya
	Kota Jayapura	Baseball/Softball	Komplek Uncen Waena
	Kota Jayapura	Panjat Tebing	Kodam XVII Cenderawasih
	Kota Jayapura	Tennis Indoor	Bayangkara POLDA
	Kota Jayapura	Wisma Atlet Mandala	Mandala
	Kabupaten Jayapura	Stadion Utama	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Gedung Serba Guna	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Indoor Stadium	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Wisma Atlet	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Wisma Asrama Deret	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Critical Centre	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Akuatik	Kampung Harapan
	Kabupaten Jayapura	Volly Pasir	Kalkhote
	Kabupaten Biak Numfor	Hoki Indoor	Hoki
	Kabupaten Merauke	Berkuda	Taman Pinang
	Kabupaten Jayawijaya	Arena Billiard	Arena Billiard
2. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN			
	Kota Jayapura	Gulat dan Judo	GOR Mandala
	Kota Jayapura	Kempo dan Wushu	GOR Smakor
	Kota Jayapura	Anggar	Sport Hall Head Sai
3. REHAB DAN PEMBANGUNAN			
	Kota Jayapura	Panahan	Mahacandra UNCEN Waena
	Kota Jayapura	Senam	GOR Cenderawasih
	Kabupaten Jayapura	Menembak	RINDAM VIII
	Kabupaten Biak Numfor	Hoki Lapangan	Hokey Ridge
	Kabupaten Biak Numfor	Sepakbola	Stadion Cenderawasih
	Kabupaten Merauke	Taekwondo	GOR Head Sai
	Kabupaten Jayawijaya	Sepakbola	Stadion Pendidikan Wamena
4. REHAB			
	Kota Jayapura	Tennis Meja	GOR Trikora
	Kota Jayapura	Tennis Outdoor	Komplek Walikota
5. RENOVASI			
	Kota Jayapura	Spatu Roda	Lapangan Otonom
	Kota Jayapura	Voli Indoor	GOR Waringin
	Kota Jayapura	Sepakbola	Stadion Mandala
	Kota Jayapura	Pencak Silat	Auditorium UNCEN Abepura
	Kabupaten Jayapura	Sepakbola	Stadion Barnabas Youwe
	Kabupaten Biak Numfor	Bermotor	Sumberker
	Kabupaten Merauke	Bermotor	Sirkuit Gastrack

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.3.1 Rencana Pengembangan Venue Kota Jayapura

Untuk Kota Jayapura sendiri terdapat beberapa Venue yang akan di bangun dan di rehab serta di renovasi. Selain venue juga direncanakan pembangunan wisma guna menunjang kebutuhan Akomodasi pada pelaksanaan PON XX.

Dan rencana dapat dilihat ari pembagian sebaran venue tersebut.

Tabel 6.5 Cabang Olahraga dan Venue Kota Jayapura

No	Cabang Olahraga	Venue	Status Lahan	Rekomendasi
1	AEROSPORT/ DIRGANTARA			
	– Gantole	Kawasan Koya	Hak Ulayat	Pembangunan Baru
	– Paralayang	Kawasan Koya	Hak Ulayat	Pembangunan Baru
	– Paramotor	Kawasan Koya	Hak Ulayat	Pembangunan Baru
	– Terbang Layang	Kawasan Koya	Hak Ulayat	Pembangunan Baru
2	AKUATIK			
	Renang Perairan Terbuka	Pantai DOK II		Pengadaan & Penataan
3	PABSI			
	– Angkat Besi	Ballroom Aston	Swasta	Pengadaan & Penataan
	– Angkat Berat	Ballroom Aston	Swasta	Pengadaan & Penataan
	– Binaraga	Ballroom Aston	Swasta	Pengadaan & Penataan
4	SEPEDA			
	Sepeda BMX	Buper Waena	Pemda Provinsi	Pengadaan & Penataan
5	BASEBALL / SOFTBALL			
	– Baseball	Komplek Uncen Waena	Universitas Cenderawasih	Pembangunan Baru
	– Softball	Komplek Uncen Waena	Universitas Cenderawasih	Pembangunan Baru
6	VOLI			
	Voli Indoor	GOR Waringin	Pemda Kota Jayapura	Renovasi
7	BRIDGE	Ruang Rapat Aston	Swasta	Pengadaan & Penataan
8	BASKET	Kawasan Koya	Hak Ulayat	Pembangunan Baru
8	CATUR	Ruang Rapat Aston	Swasta	Pengadaan & Penataan
9	CRIKET	Kompleks Uncen Waena	Universitas Cenderawasih	Pembangunan Baru
10	DANSA	Sasana Krida	Pemda Provinsi	Pengadaan & Penataan
11	JUDO dan GULAT	GOR Mandala	Pemda Provinsi	Melanjutkan Pembangunan
12	KEMPO	GOR SMAKOR	Pemda Provinsi	Melanjutkan Pembangunan
13	PANAHAN	Mahacandra UNCEN	Universitas Cenderawasih	Rehab & Pembangunan
14	PANJAT TEBING	KODAM XVII Cenderawasih	KODAM XVII Cenderawasih	Pembangunan Baru
15	PENCAK SILAT	Auditorium UNCEN	Universitas Cenderawasih	Renovasi
16	SELAM LAUT	Pantai DOK II		Pengadaan & Penataan
17	SENAM	GOR Cenderawasih	Pemda Provinsi	Rehab & Pembangunan
18	SEPAKBOLA			
	– Sepakbola (Semi Final)	Stadion Mandala	Pemda Provinsi	Renovasi
	– Futsal	Kawasan Koya	Hak Ulayat	Pembangunan Baru
20	SEPATU RODA	Buper Waena	Pemda Provinsi	Renovasi
21	TENNIS MEJA	GOR Trikora	Pemda Provinsi	Rehab & Pembangunan
22	TENNIS			
	– Tennis Indoor	POLDA PAPUA	POLDA PAPUA	Pembangunan Baru
	– Tennis Outdoor	Komplek Walikota	Pemda Kota Jayapura	Rehab
23	PENCAK SILAT	Auditorium UNCEN	Universitas Cenderawasih	Renovasi
24	WUSHU	GOR SMAKOR	Pemda Provinsi	Melanjutkan Pembangunan

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.6 Item Pembangunan Baru Venue Kota Jayapura

No	Lokasi	Venue	Item	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
PEMBANGUNAN BARU							
1	AEROSPORT (Gantole, Paralayang, Paramotor, dan Terbang Layang)	Kawasan Koya	Site	4000	m2	Rp 2,000,000	Rp 8,000,000,000
			Bangunan	800	m2	Rp 2,000,000	Rp 1,600,000,000
			Hanggar	1200	m2	Rp 3,000,000	Rp 3,600,000,000
			Assesories	1	Ls	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
			Pekerjaan Non Standard	1	Ls		Rp 7,920,250,000
						SUB JUMLAH	Rp 21,122,750,000
2	BOLA BASKET (Basket Hall Centre)	Kawasan Koya	Site	32,000	m2	Rp 60,000	Rp 1,920,000,000
			Bangunan + Tribun	20,000	m2	Rp 10,000,000	Rp 200,000,000,000
			Lapangan Parquet	2,600	m2	Rp 2,000,000	Rp 5,200,000,000
			Peralatan (Matras)	4	Bh	Rp 35,000,000	Rp 140,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Scoring Board	4	Bh	Rp 6,000,000	Rp 24,000,000
			Parkir	10,800	m2	Rp 1,500,000	Rp 16,200,000,000
			RTH	10,800	m2	Rp 200,000	Rp 2,160,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 138,986,400,000
						SUB JUMLAH	Rp 370,630,400,000
3	GOR Futsal	Kawasan Koya	Site	4000	m2	Rp 60,000	Rp 240,000,000
			Bangunan + Tribun	2800	m2	Rp 10,000,000	Rp 28,000,000,000
			Lapangan Sintetis	180	m2	Rp 8,000,000	Rp 1,440,000,000
			Aksesories	1	Ls	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Scoring Board	2	Bh	Rp 20,000,000	Rp 40,000,000
			Parkir	108	m2	Rp 1,500,000	Rp 162,000,000
			RTH	108	m2	Rp 200,000	Rp 21,600,000
	Pekerjaan Non Standard				Rp 21,560,160,000		
						SUB JUMLAH	Rp 57,493,760,000

4	VELODROOM	Kawasan Koya	Site	21,000	m2	Rp 60,000	Rp 1,260,000,000
			Bangunan + Tribun	10,000	m2	Rp 10,000,000	Rp 100,000,000,000
			Lintasan	10,000	m2	Rp 600,000	Rp 6,000,000,000
			Ruang Bebas	52	m2	Rp 100,000	Rp 5,200,000
			Parkir	10,000	m2	Rp 2,000,000	Rp 20,000,000,000
			RTH	4,000	m2	Rp 500,000	Rp 2,000,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp 300,000,000	Rp 300,000,000
			Genset	2	Bh	Rp 8,000,000	Rp 16,000,000
			Skoring Board	1	Bh	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 79,552,320,000
SUB JUMLAH							Rp 212,139,520,000
5	BASEBALL / SOFTBALL						
	• Baseball/Softball	Komplek Uncen Waena	Site	40,000	m2	Rp 60,000	Rp 2,400,000,000
			Bangunan + Tribun	4,600	m2	Rp 10,000,000	Rp 46,000,000,000
			Lapangan Rumput	12,000	m2	Rp 500,000	Rp 6,000,000,000
			Parkir	800	m2	Rp 2,000,000	Rp 1,600,000,000
			RTH	400	m2	Rp 150,000	Rp 60,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Genset	4	Bh	Rp 8,000,000	Rp 32,000,000
			Skoring Board	1	Bh	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 37,258,800,000
SUB JUMLAH							Rp 99,356,800,000

6	PANJAT TEBING	KODAM XVII Cenderawasih	Site	7,800	m2	Rp 60,000	Rp 468,000,000
			Pekerjaan Persiapan	80	m2	Rp 12,075,000	Rp 966,000,000
			Pekerjaan Pondasi	1,500	m2	Rp 30,000,000	Rp 45,000,000,000
			Rangka Utama	8	m2	Rp 50,000,000	Rp 400,000,000
			Pengerjaan Pengecatan	600	m2	Rp 80,000	Rp 48,000,000
			Transport	500	m2	Rp 8,000,000	Rp 4,000,000,000
			Panel Imprin's Fiberglass	1	Ls	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 30,589,200,000
SUB JUMLAH							Rp 81,571,200,000
7	TENNIS						
	• Tennis Indoor	POLDA PAPUA (Bayangkara)	Tribun	7,000	m2	Rp 10,000,000	Rp 70,000,000,000
	<input type="checkbox"/>		Bangunan	7,000	m2	Rp 10,000,000	Rp 70,000,000,000
	<input type="checkbox"/>		Lapangan Parquet	150	m2	Rp 5,000,000	Rp 750,000,000
	<input type="checkbox"/>		Ruang Bebas	400	m2	Rp 500,000	Rp 200,000,000
	<input type="checkbox"/>		M/E	1	Ls	Rp6,000,000,000	Rp 6,000,000,000
	<input type="checkbox"/>		Sanitary	1	Ls	Rp6,000,000,000	Rp 6,000,000,000
	<input type="checkbox"/>		Genset	4	Bh	Rp 8,000,000	Rp 32,000,000
	<input type="checkbox"/>		Skoring Board	2	Bh	Rp 6,000,000	Rp 12,000,000
	<input type="checkbox"/>		Parkir + RTH	8,000	m2	Rp 1,500,000	Rp 12,000,000,000
	<input type="checkbox"/>		Pekerjaan Non Standard				Rp 98,996,400,000
SUB JUMLAH							Rp 263,990,400,000
8	Wisma Atlet (mandala)		Site	17,200	m2	Rp 3,000,000	Rp 51,600,000,000
			Bangunan	15,000	m2	Rp 13,000,000	Rp 195,000,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp6,000,000,000	Rp 6,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp6,000,000,000	Rp 6,000,000,000
			Parkir	2,000	m2	Rp 2,000,000	Rp 4,000,000,000
			RTH	2,000	m2	Rp 200,000	Rp 400,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 168,417,600,000
SUB JUMLAH							Rp 431,417,600,000

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.7 Item Melanjutkan Pembangunan Venue Kota Jayapura

No	Lokasi	Venue	Item	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	JUDO dan WUSHU	GOR Mandala	Bangunan	1,670	m2	Rp 10,000,000	Rp 16,700,000,000
			Ruang Bebas	52	m2	Rp 600,000	Rp 31,200,000
			Parkir	200	m2	Rp 1,200,000	Rp 240,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
			Genset	2	Bh	Rp 8,000,000	Rp 16,000,000
			Skoring Board	1	Bh	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
			SUB JUMLAH				
2	KEMPO	GOR SMAKOR	Bangunan	160	m2	Rp 10,000,000	Rp 1,600,000,000
			Parkir	500	m2	Rp 1,200,000	Rp 600,000,000
			RTH	200	m2	Rp 200,000	Rp 40,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
			Genset	2	Bh	Rp 8,000,000	Rp 16,000,000
			Penerangan	150	Watt	Rp 2,000,000	Rp 300,000,000
			Skoring Board	1	Bh	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
SUB JUMLAH						Rp 4,558,000,000	

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.8 Item Rehab dan Pembangunan Venue Kota Jayapura

No	Lokasi	Venue	Item	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	PANAHAH	Mahacandra UNCEN Waena	Site	43,300	m2	Rp 60,000	Rp 2,598,000,000
			Bangunan + Tribun	7,000	m2	Rp 10,000,000	Rp 70,000,000,000
			Lapangan Rumput	15,000	m2	Rp 1,500,000	Rp 22,500,000,000
			Ruang Bebas	52	m2	Rp 200,000	Rp 10,400,000
			Parkir	100	m2	Rp 2,000,000	Rp 200,000,000
			RTH	200	m2	Rp 200,000	Rp 40,000,000
			M/E	1	Ls	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000
			Sanitary	1	Ls	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000
			Genset	2	Bh	Rp 8,000,000	Rp 16,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 62,018,640,000
SUB JUMLAH							Rp 165,383,040,000
2	SENAM	GOR Cenderawasih	Bangunan + Tribun	2,400	m2	Rp 10,000,000	Rp 24,000,000,000
			Pengecatan Bangunan	4,800	m2	Rp 80,000	Rp 384,000,000
			Parkir	200	m2	Rp 1,200,000	Rp 240,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Sanitary	1	Ls	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
			Genset	2	Bh	Rp 28,000,000	Rp 56,000,000
			Penerangan	200	Watt	Rp 100,000,000	Rp 20,000,000,000
			Skoring Board	1	Bh	Rp 8,000,000	Rp 8,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 30,424,800,000
SUB JUMLAH							Rp 81,132,800,000

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.9 Item RehabVenue Kota Jayapura

No	Lokasi	Venue	Item	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	PENCAK SILAT	GOR Trikora	Site	4,330	m2	Rp 60,000	Rp 259,800,000
			Bangunan + Tribun	3,000	m2	Rp 10,000,000	Rp 30,000,000,000
			Parkir	40	m2	Rp 2,000,000	Rp 80,000,000
			RTH	10	m2	Rp 200,000	Rp 2,000,000
			Instalasi Listrik	1	Ls	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			M/E	1	Ls	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000
			Instalasi Air	1	Ls	Rp 3,000,000,000	Rp 3,000,000,000
			Sanitary	1	Ls	Rp 4,000,000,000	Rp 4,000,000,000
			Genset	2	Bh	Rp 8,000,000	Rp 16,000,000
			Pekerjaan Non Standard				Rp 26,614,680,000
SUB JUMLAH							Rp 70,972,480,000
2	TENNIS OUTDOOR	Komplek Walikota	Tribun	5,000	m2	Rp 500,000	Rp 2,500,000,000
	<input type="checkbox"/>		Bangunan	900	m2	Rp 10,000,000	Rp 9,000,000,000
	<input type="checkbox"/>		Sanitary	1	Ls	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000
	<input type="checkbox"/>		Genset	4	Bh	Rp 8,000,000	Rp 32,000,000
	<input type="checkbox"/>		Penerangan	150	Watt	Rp 2,000,000	Rp 300,000,000
	<input type="checkbox"/>		Skoring Board	1	Bh	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	<input type="checkbox"/>		Pekerjaan Non Standard				Rp 7,113,000,000
SUB JUMLAH							Rp 18,968,000,000

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.10 Item Renovasi Venue Kota Jayapura

No	Lokasi	Venue	Item	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SEPEDA						
	• Sepeda BMX	Lapangan Otonom	Site	400	m2	Rp 60,000	Rp 24,000,000
	□		Track BMX	300	m2	Rp 500,000	Rp 150,000,000
	□		Pekerjaaaan Non Standard	1	Ls		Rp 104,400,000
SUB JUMLAH							Rp 278,400,000
2	VOLI						
	• Voli Indoor	GOR Waringin	Atap	1,000	m2	Rp 50,000	Rp 50,000,000
	□		Sanitary	32	m2	Rp 6,000,000	Rp 192,000,000
	□		Sirkulasi Air	1	Ls	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
SUB JUMLAH							Rp 252,000,000
3	SEPAKBOLA						
	• Sepakbola (Semi Final)	Stadion Mandala	Bangunan + Tribun	3,240	m2	Rp 60,000	Rp 194,400,000
	□		Pengecatan Tribun	3,240	m2	Rp 70,000	Rp 226,800,000
SUB JUMLAH							Rp 421,200,000
4	TENNIS MEJA	Auditorium UNCEN Abepura	Pengecatan	400	m2	Rp 70,000	Rp 28,000,000
SUB JUMLAH							Rp 28,000,000

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.3.2 Rencana Pengembangan Venue Kabupaten Jayapura

Untuk Kabupaten Jayapura selain Komplek Kampung Harapan yang menjadi Venue Utama ada beberapa venue yang akan di bangun baru dan rehab serta renovasi. Selain venue juga direncanakan pembangunan wisma guna menunjang kebutuhan Akomodasi pada pelaksanaan PON XX.

Tabel 6.11 Cabang Olahraga dan Venue Kabupaten Jayapura

No	Cabang Olahraga	Venue	Status Lahan	Rekomendasi
1	AKUATIK			Pembangunan Baru
	• Renang	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	
	• Renang Indah	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	
	• Loncat Indah	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	
	• Polo Air	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	
	• Selam Kolam	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	
2	ATLETIK	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	Pembangunan Baru
3	SEPEDA			
	• Balap Sepeda	Jalan Raya Kemiri		Pengadaan & Peralatan
	• Sepeda Track/Veodroom	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	Pembangunan Baru
4	VOLI			
	• Voli Pantai	Kalkhote	Pemda Provinsi	Pembangunan Baru
5	DAYUNG			
	• Canoeing	Kalkhote / Danau Sentani		Pengadaan & Peralatan
	• Rowing	Kalkhote / Danau Sentani		Pengadaan & Peralatan
	• Tradional Boat	Kalkhote / Danau Sentani		Pengadaan & Peralatan
6	DRUMBAND			
	• Drumband Indoor	Kampung Harapan	Pemda Provinsi	Pengadaan & Peralatan
	• Drum Band Outdoor	Jalan Kemiri		Pengadaan & Peralatan
7	MENEMBAK	Rindam VIII	Rindam VIII	Pembangunan Baru
8	SEPAKBOLA			
	• Sepakbola (Penyisihan)	Stadion Barnabas Youwe	Pemda Kabupaten	Renovasi
	• Sepakbola (Final)	Stadion Utama Kp. Harapan	Pemda Provinsi	Pembangunan Baru
9	SEPAK TAKRAW	GOR TOWARE	Pemda Provinsi	Rehab

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.12 Item Pembangunan Baru Venue Kabupaten Jayapura

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Kalkhote - Kab. Jayapura	Kalkhote	Voli Pasir / Pantai	512	m2	Site
						Peralatan
						Pekerjaan Non Standard
						<i>Sumber : Analisa dan Kajian 2015</i>

Tabel 6.13 Item Rehab Venue Kabupaten Jayapura

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	GOR Toware - Kab. Jayapura	GOR Toware	Sepak Takraw + Wushu	32,400	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Lapangan Parquet
						Bola Takraw
						Peralatan (Sepak Takraw)
						Peralatan (Matras)
						Istalasi Listrik
						Instalasi Air
						Penerangan
						Scoring Board
						Parkir
2	Rindam VIII - Kab. Jayapura	Ringdam VIII	Menembak			Podium
						Meja Panitia + pengawas
						Toilet
						Spot Tembak
						Peralatan
						<i>Sumber : Analisa dan Kajian 2015</i>

Tabel 6.14 Item Pengadaan dan Penataan Venue Kabupaten Jayapura

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Kampung Harapan - Kab. Jayapura	Kampung Harapan	Pentatlon & Tratlton			Podium
						Meja Panitia + pengawas
2	Ifar Gunung - Kab. Jayapura	Ifar Gunung	Paralayang			Podium
						Meja Panitia + pengawas
						Lintasan Pendaratan
3	Danau Sentani - Kalkhote - Kab. Jayapura	Kalkhote - Danau Sentani	Dayung, Ski Air & Traditional Boat			Podium
						Meja Panitia + pengawas
						Menara Pengawas
						Ruang Pengawas
						Ruangan Wasit
4	Jalan Kemiri - Kab. Jayapura	Jalan Kemiri	Drum Band Outdoor			Podium
						Meja Panitia + pengawas

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

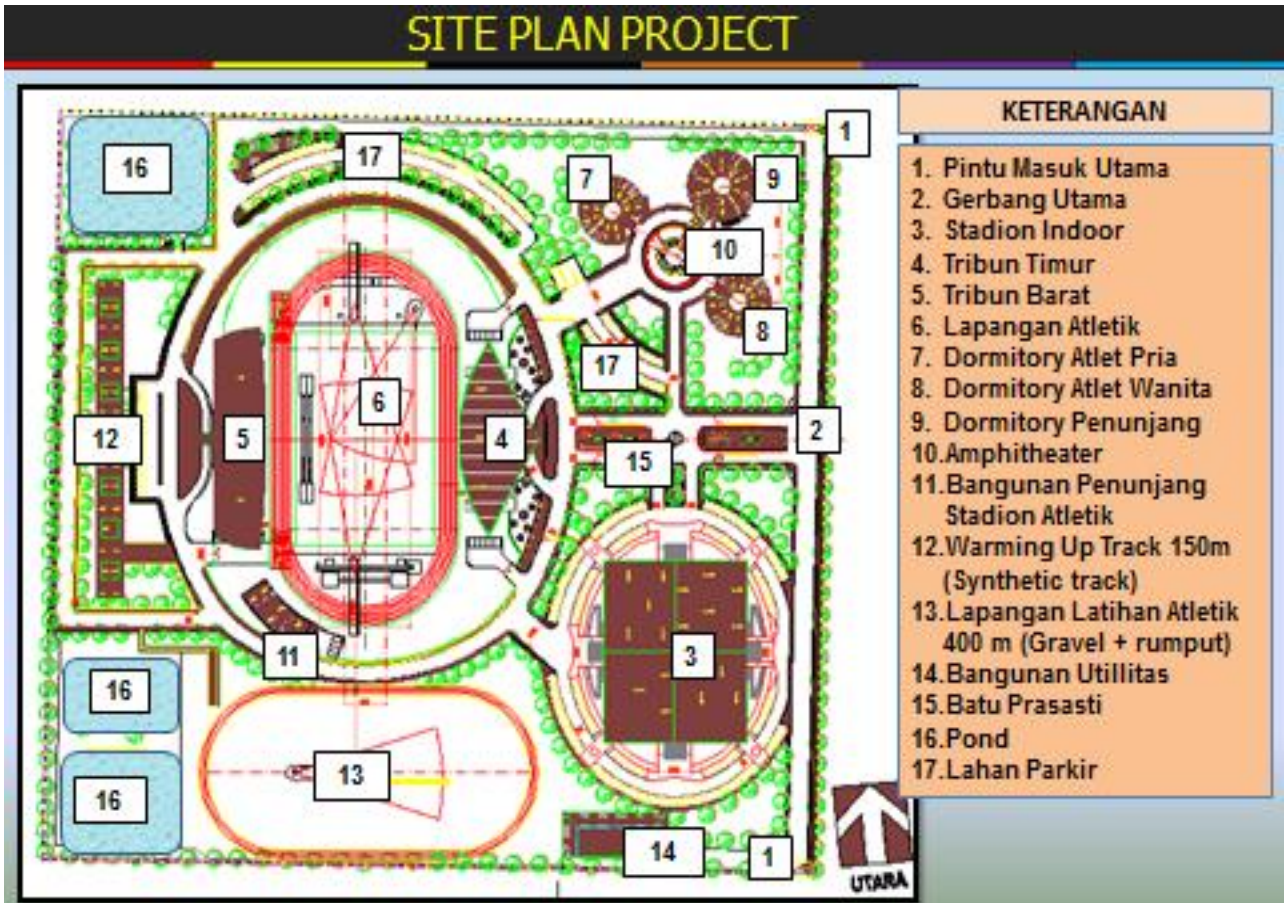
Tabel 6.15 Item Melanjutkan Pembangunan Venue Kabupaten Mimika

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Mimika Sport Complex - Kab. Mimika	Mimika Sport Complex	Atletik	72,452	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Track Atletik -Sintetis
						Track Latihan Atletik -Sintetis
						Warming Up
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Penerangan
						Scoring Board
						Parkir
						RTH
2	Mimika Sport Complex - Kab. Mimika	Indoor Stadium	Bulutangkis	18,802	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Lapangan Parquet
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Scoring Board
						Parkir
						RTH
3	Mimika Sport Complex - Kab. Mimika	Mimika Sport Complex	Rugby	72,452	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Track Atletik -Sintetis
						Track Latihan Atletik -Sintetis
						Warming Up
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Penerangan
						Scoring Board
						Parkir
						RTH

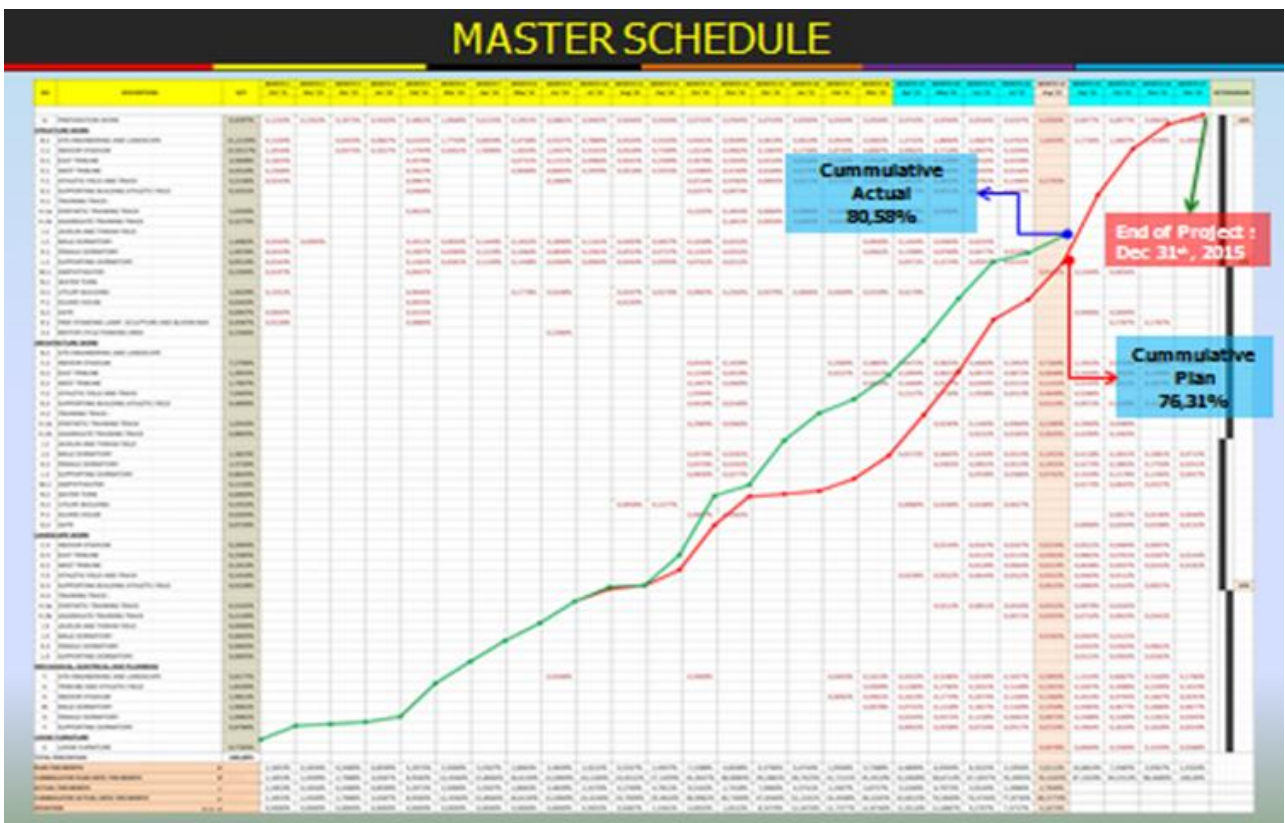
Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.3.3 Rencana Pengembangan Venue Kabupaten Mimika

Pada Kabupaten Mimika ada dua lokasi yang menjadi pusat kegiatan olahraga untuk PON XX, yaitu Mimika Sport Kompleks dan Kuala Kencana Freeport. Pada Mimika Sport Kompleks sendiri terdiri dari beberapa bangunan yang sedang dalam tahap pembangunan, dan progress terakhir sudah mencapai 89% (Delapan Puluh Sembilan Prosen), berikut adalah data dan gambar kondisi Mimika Sport Kompleks,



Gambar 6.6 Site Plan Proekct Mimika Sport Compleks



Gambar 6.7 Master Schedue Mimika Sport Compleks



Gambar 6.8 Eksistig dan Progress Mimika Sport Kompleks

Selain dari Mimika sport Kompleks ada beberapa venue untuk cabang olahraga lain di berbagai lokasi, berikut adalah cabang olahraga dan venue serta rekomendasi penanganannya.

Tabel 6.16 Cabang Olahraga dan Venue Kabupaten Mimika

No	Cabang Olahraga	Venue	Status Lahan	Rekomendasi
1	BOWLING	Mall Timika	Swasta	Penataan
2	BULUTANGKIS	Mimika Sport Kompleks	PT Freeport Indonesia	Melanjutkan Pembangunan
3	GOLF	Kuala Kencana Freeport	PT Freeport Indonesia	Melanjutkan Pembangunan
4	GULAT	Mimika Sport Kompleks	PT Freeport Indonesia	Melanjutkan Pembangunan
5	SQUASH	Kuala Kencana Freeport	PT Freeport Indonesia	Melanjutkan Pembangunan
6	TINJU	Mimika Sport Kompleks	PT Freeport Indonesia	Melanjutkan Pembangunan

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.17 Item Rehab Venue Kabupaten Mimika

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Kuala Kencana Freeport - Kab. Mimika	Kuala Kencana Freeport	Tinju + Muaythai	15,210	m2	Site
						Tribun
						Ring (Tinju + Muay Thai)
						Tali Multiflament
						Gamsil untuk - Tinju
						Parkir
						RTH
2	Kuala Kencana Freeport - Kab. Mimika	GOR Futsal Kuala Kencana Freeport	Futsal	17,468	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Lapangan Parquet
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Scoring Board
						Parkir

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.3.4 Rencana Pengembangan Venue Kabupaten Biak Numfor

Di Biak Numfor ada beberapa venue yang menggelar cabang olahraga namun hamper 90 % venue tersebut harus di rehab dan pembangunan ulang.

Tabel 6.18 Cabang Olahraga dan Venue Kabupaten Biak Numfor

NO	CABANG OLAHRAGA	VENUE	STATUS LAHAN	REKOMENDASI
1	AEROSPORT / DIRGANTARA			
	• Aeromodeling	Bandara Frans Kaisiepo	Angkasa Pura	Penataan
	• Terjun Payung	Bandara Frans Kaisiepo	Angkasa Pura	Penataan
2	BERMOTOR	Sirkuit Sumberker	Milik Warga	Penataan
3	HOKEY			
	• Hoki Indoor	Hoki Indoor Stadium	Pemda Kabupaten	Pembangunan Baru
	• Hoki Outdoor	Lapangan Hoki Ridge	Pemda Kabupaten	Rehab dan Pembangunan
4	LAYAR	Kep. Padaido		Penataan
5	SEPAKBOLA			
	• Sepakbola	Stadion Cenderawasih	Pemda Kabupaten	Rehab dan Pembangunan
	• Sepakbola	Stadion Perseru Serui	Pemda Kabupaten	Renovasi

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.19 Item Pembangunan Baru Venue Kabupaten Biak Numfor

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Stadion Hokey - Biak Numfor	Hokey Ridge	Hoki Indoor	40,000	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Lapangan Rumput Sintetis
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Parkir
						RTH
						Pekerjaan Non Standar

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.20 Item Rehab Venue Kabupaten Biak Numfor

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Stadion Hokey - Biak Numfor	Hokey Ridge	Hoki outdoor	40,000	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Lapangan Rumput Sintetis
						Instalasi Listrik dan Air
						Parkir + RTH
						Pekerjaan Non Standar
2	Stadion Cenderawasih - Biak Numfor	Stadion Cenderawasih	Sepakbola	41,570	m2	Site, Bangunan + Tribun
						Lapangan Rumput
						Track Atletik -Sintetis
						Instalasi Listrik + Air
						Scoring Board
						Pekerjaan Non Standar

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.21 Item Penataan Venue Kabupaten Biak Numfor

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Bandara Frans Kaisiepo - Kab. Biak Numfor	Bandara Frans Kaisiepo	Aeromodeling, Terjun Payung			Podium
						Meja Panitia + pengawas
						Spot Pendaratan

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.3.5 Rencana Pengembangan Venue Kabupaten Merauke

Di Merauke venue yang menggelar cabang olahraga yang sedang dalam progress pengerjaan dan siap untuk perencanaan prembangunan baru.

Tabel 6.22 Cabang Olahraga dan Venue Kabupaten Merauke

No	Cabang Olahraga	Venue	Status Lahan	Rekomendasi
1	ANGGAR	Sport Hall Head Sai	Pemda Kabupaten	Melanjutkan Pembangunan
2	BERKUDA			
	• Balap Kuda	Sirkuit Taman Pinang	Pemda Kabupaten	Pembangunan Baru
	• Equestrian (Ketangkasan)	Sirkuit Taman Pinang	Pemda Kabupaten	Pembangunan Baru
3	BERMOTOR	Sirkuit Merauke	Pemda Kabupaten	Renovasi
4	KARATE	GOR Head Sai	Pemda Kabupaten	Rehab
5	TAEKWONDO	GOR Head Sai	Pemda Kabupaten	Rehab

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.23 Item Pembangunan Baru Venue Kabupaten Merauke

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Lapangan Berkuda Taman Pinang	Sirkuit Berkuda	Berkuda dan Equestrian (Ketangkasan Berkuda)	12400	m2	Site, bangunan dan Tribun
						Paddock Kuda
						Instalasi Listrik dan Air
						Parkir + RTH
						Pekerjaan Non Standard

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.24 Item Melanjutkan Pembangunan Venue Kabupaten Merauke

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Sport Hall - GOR Head Sai - Kab. Merauke	Sport Hall - GOR Head Sai	Anggar	3,200	m2	Site
						Bangunan
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Parkir
						RTH

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.25 Item Rehab Venue Kabupaten Merauke

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	GOR Head Sai - Kab. Merauke	GOR Head Sai	Karate & Taekwondo	14,710	m2	Persiapan
						Pekerjaan Tanah
						Pekerjan Beton
						Pekerjaan Tribun
						Pekerjaan Atap
						Pekerjaan Pintu
						matras
						Gamsil untuk Karate - Taekwondo
						Parkir
						RTH

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.26 Item Penataan Venue Kabupaten Merauke

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Bandara Mopah - Kab. Merauke	Bandara Mopah	Terbang Layang			Podium
						Meja Panitia + pengawas
						Spot Pendaratan

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6.3.6 Rencana Pengembangan Venue Kabupaten Jayawijaya

Pada venue Kabupaten Jayawijaya yang menggelar cabang olahraga untuk perencanaan prembangunan baru dan beberapa di rehab dan penataan.

Tabel 6.27 Cabang Olahraga dan Venue Kabupaten Jayawijaya

No	Cabang Olahraga	Venue	Status Lahan	Rekomendasi
1	SEPEDA			
	• Sepeda Gunung	Kawasan Hutan LIPI	LIPI	Penataan
2	BILLIAR	GOR/Arena Billiard	Pemda	Pembangunan Baru
3	SEPAKBOLA			
	• Sepakbola (Penyisihan)	Stadion Wamena	Pemda	Rehab dan Pembangunan
4	MUAY THAI	GOR Ukumerek	Swasta	Penataan

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.28 Item Pembangunan Baru Venue Kabupaten Jayawijaya

No	Lokasi / Cluster	Venue / Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Wamena	Arena Billiard	Billiard	3,200	m2	Site
						Bangunan
						Instalasi Listrik
						Instalasi Air
						Parkir
						RTH

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.29 Item Rehab Venue Kabupaten Jayawijaya

No	Lokasi / Cluster	Venue , Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	Stadion Pendidikan - Kab. Jayawijaya	Stadion Pendidikan Wamena	Sepak Bola	41,570	m2	Site
						Bangunan + Tribun
						Lapangan Rumput (Zoysia Martela)
						Track Atletik - Sintetis
						Pengadaan Genset
						Pengadaan Air
						Scoring Board

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

Tabel 6.30 Item Penataan Venue Kabupaten Jayawijaya

No	Lokasi / Cluster	Venue , Bangunan	Cabang Olahraga	Luasan	Satuan	Item
1	GOR Ukuamerek Aso - Kab. Jayawijaya	GOR Ukuamerek Aso	Billiard			Meja panitia & Juri
						Matras Tarung Drajat
						Arena Billiard
2	Kawasan Hutan LIPI - Kab. Jayawijaya	Sirkuit Sepeda Gunung	Sepeda Gunung			Meja panitia & Juri

Sumber : Analisa dan Kajian 2015

6.6 Rencana Pengembangan Infrastruktur Per Cluster (Kota/Kabupaten)

Pada setiap cluster guna menunjang penyelenggaraan PON XX maka diperlukan beberapa penunjang untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan dengan cara pengembangan infrastruktur dan peningkatan ketersediaan infrastruktur.

Berikut rencana pengembangan infrastruktur di berbagai cluster dengan menitik beratkan pada transportasi dan penunjang seperti listrik, sumber daya air dan telekomunikasi.

6.7.1 Rencana Pengembangan di Kota dan Kabupaten Jayapura

6.7.1.1 Transportasi

Rencana Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Untuk mencapai target konektivitas di Provinsi Papua yang dapat menjawab permasalahan kemahalan daerah dan kesenjangan antar wilayah adat dan antar kabupaten, maka program pembangunan infrastruktur transportasi baik sektor transportasi Darat, Udara dan Laut selama 5 (lima) tahun akan diuraikan dibawah ini.

Pengembangan transportasi yang direncanakan juga bukan hanya perencanaan jangka pendek untuk lima tahun kedepan tetapi juga perencanaan pembangunan hingga tahun 2025, Adapun rician anggaran yang tercantum dalam dokumen RIPI 2011 dan anggaran yang dibutuhkan dapat dikelompokkan sesuai dengan pembagaaian wilayah adat dan jenis moda transportasi yakni kebutuhan transportasi darat, udara, laut. Arah pengembangan transportasi di Provinsi Papua diarahkan untuk mencapai suatu sistem transportasi yang berkelanjutan, yang dapat diidentifikasi sebagai transportasi yang efisien dan efektif. Dengan demikian, diharapkan terwujud percepatan pembangunan

khususnya di daerah pedesaan, dengan pengembangan kota-kota kecil dan menengah sehingga kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua dapat terminimalisir.

Tabel 6.31 Rencana Pengembangan dan Arah Pengembangan Infrastruktur Transportasi

No	Uraian Pengembangan	Lokasi (Kabupaten / Kota)
1	Penyelesaian Jalan dan jembatan Jayapura-Hamadi-Holetekamp-Batas	Kota Jayapura
2	Pembangunan Fly Over	Kota Jayapura
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Danau	Kota Jayapura
1	Pembangunan Fly Over (Alternative)	Kabupaten Jayapura
2	Pengalihan Rute depan kampung Harapan	Kabupaten Jayapura
3	Pengembangan Transportasi Danau Sentani (Kalkhote)	Kabupaten Jayapura
4	Pengembangan Bandara Sentani	Kabupaten Jayapura
5	Pengembangan Pelabuhan Depapre	Kabupaten Jayapura
1	Pembangunan Jalan Menuju Mimika Sport Kompleks	Kabupaten Mimika
1	Pengembangan Jaringan Jalan Dan Perbaikan Kondisi Jaringan Jalan Yang Rusak	Kabupaten Biak Numfor
2	Pengembangan Bandara Frans Kaisiepo	Kabupaten Biak Numfor
	Pengembangan Bagian Selatan Runway	Kabupaten Biak Numfor
	Pembangunan gedung terminal baru dan fasilitas penunjang	Kabupaten Biak Numfor
	Pembongkaran gedung terminal lama (eksisting)	Kabupaten Biak Numfor
	Pembangunan jalan sisi pantai dan reklamasi	Kabupaten Biak Numfor

No	Uraian Pengembangan	Lokasi (Kabupaten / Kota)
	Penataan landscape kawasan	Kabupaten Biak Numfor
	Pengembangan Bagian Utara Runway	Kabupaten Biak Numfor
	Pembebasan lahan	Kabupaten Biak Numfor
	Pembangunan gedung terminal baru dan fasilitas penunjang	Kabupaten Biak Numfor
3	Pengembangan Transportasi Kepulauan Padaido	Kabupaten Biak Numfor
4	Pengadaan Bus Air	Kabupaten Biak Numfor
1	Pengembangan Bandara Udara Mopah	Kabupaten Merauke
1	Peningkatan Kualitas Jalan	Kabupaten Jayawijaya
2	Pembangunan Terminal Pusat WP I di Distrik Wamena Pusat	Kabupaten Jayawijaya

Sumber : Analisa dan Kajian 2015 dan Road Map Infra Cetak 2014

6.7.1.2 Infrastruktur Penunjang (Listrik, Sumber Daya Air dan Telekomunikasi)

Dalam pengembangannya untuk menunjang PON XX di Provinsi Papua, selain kebutuhan Venue dan Akomodasi sebagai tinfrastruktur penting dan utama, harus ditunjang oleh beberapa infrastruktur lainnya yaitu Transportasi dan penunjangnya. Pada konektivitas dari beberapa venue dan akomodasi yang direncanakan membutuhkan kelengkapan infrastruktur listrik, air bersih dan telekomunikasi. Berikut adalah beberapa rencana pengembangan untuk menunjang hal tersebut.

Tabel 6.32 Rencana Pengembangan dan Arah Pengembangan Infrastruktur Penunjang

Kabupaten / Kota	Pengembangan	Arah Pengembangan
KOTA JAYAPURA	Air Bersih dan SDA	Pengembangan Air Baku Danau Sentani
		Pembangunan WTP Air Baku Danau Sentani
		Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum
		Penanganan Kawasan Banjir
		Pengembangan Drainase
	Listrik	Penyelesaian Transmisi PLTU Holtekamp
		Pengembangan Saluran transmisi 70 kV
	Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur Menara Bersama Telepon Nirkabel / BTS
		Pengembangan Bandwitch
	KABUPATEN JAYAPURA	Air Bersih dan SDA
Pembangunan WTP Air Baku Danau Sentani		
Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum		
Penanganan Kawasan Banjir		
Pengembangan Drainase		
Listrik		Pengembangan PLTA Urunuay Genyem
		Pengembangan Saluran transmisi 70 kV
Telekomunikasi		Pengembangan Infrastruktur Menara Bersama Telepon Nirkabel / BTS
		Pengembangan Bandwitch

KABUPATEN MIMIKA	Air Bersih dan SDA	Pemeliharaan SPAM Kuala Kencana
		Pengembangan Jaringan Distribusi
		Penanganan Kawasan Banjir
		Pemeliharaan sistem air bersih komunal
		Pengembangan Drainase
	Listrik	Pembangunan PLTU Merah Putih, 4 x 7 MW
		Pembangunan PLTD A Pemda, 5 x 5 MW
	Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur Menara Bersama Telepon Nirkabel / BTS
Pengembangan Bandwitch		
KABUPATEN BIAK NUMFOR	Air Bersih dan SDA	Pembangunan Jaringan Air Minum (sumber Paray dan mata air Marau)
		Pembangunan WTP Air Baku Danau Sentani
		Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum
	Listrik	Pembangunan PLTU Urfu 2 X 10 MW
	Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur Menara Bersama Telepon Nirkabel / BTS
Pengembangan Bandwitch		
KABUPATEN MERAUKE	Air Bersih dan SDA	Pembangunan Dum Air Telaga Biru
		Pengembangan Distribusi Jaringan Air Bersih
		Penambahan Modul Tangki Air
		Pembangunan Hidran Umum
		Pengembangan Drainase
	Listrik	Pembangunan PLTD Merauke, 2 x 3,5 MW
		Pembangunan PLTU Merauke (FTP2), 2 x 7 MW
		Pembangunan PLT Biomassa, 1 x 10 MW
	Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur Menara Bersama Telepon Nirkabel / BTS
		Pengembangan Bandwitch
KABUPATEN JAYAWIJAYA	Air Bersih dan SDA	Pengembangan Air Baku dari Sungai Wasih
		Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih
	Listrik	Pembangunan PLTM Uwe, 1 x 1,4 MW
		Pembangunan PLTM Walesi Blok II, 4 x 1,5 MW
		Pembangunan PLTA Baliem, 1 x 10 MW
		Pembangunan PLTA Baliem, 2 x 10 MW
	Telekomunikasi	Pengembangan Infrastruktur Visat
		Pengembangan Bandwidth 16 Mbps (total) pada lokasi seluruh Venue PON

Sumber :1. Analisa dan Kajian 2015
2. Road map Infra Cetak 2015

6.7 Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Aset Terkait PON XX

Untuk Organisasi Pengelola Aset Prasarana (Yang baru), dapat dilakukan dengan :

- a. menggunakan pola Kerjasama dengan Swasta, dengan pembebanan PAD tertentu setiap tahunnya;
- b. Pembebanan PAD dapat dihitung berdasarkan prosentase atau berdasarkan nilai nominal tertentu yang ditentukan berdasarkan Data Statistik Pendapatan tahunannya;
- c. Pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan Aset tetap dilakukan oleh unit kerja khusus bagian dari Pemda, yang dinyatakan dalam klausul kerjasama.

Pola Organisasi dengan Kerjasama Swasta dgn memperhatikan sbb:

- a. Aset Prasarana OR memiliki Sifat Cost Recovery;
- b. Pengelolaan Aset yang memiliki sifat Cost Recovery tinggi memungkinkan untuk dikerjasamakan dengan Swasta;
- c. Pengelolaan oleh Swasta memungkinkan Profit, dibandingkan melalui pengelolaan oleh UPTD → Daerah dapat mematok PAD;
- d. Pemda terbebas dari pengembangan SDM Pengelola dan beban anggaran pemeliharaan dan Pengelolaan Aset.

6.8 Rencana Pengembangan Wisata & Ekonomi Kreatif

Beberapa gagasan untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata di Papua dalam rangka memanfaatkan momen penyelenggaraan PON XX sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sentra-Sentra Kegiatan Ekonomi Kreatif yang Memproduksi Oleh-Oleh / Buah Tangan Khas Papua, pada lokasi yang masih mudah ditempuh dari lokasi Venue maupun Akomodasi Rombongan PON XX;
- b. Pengembangan Obyek-Obyek Wisata di lokasi yang masih mudah ditempuh (memiliki jarak yang pendek dengan akses bagus) dari lokasi Venue maupun akomodasi rombongan PON XX;
- c. Peningkatan Aksesibilitas dari pusat kota (lokasi akomodasi rombongan PON XX) ke lokasi obyek wisata dan ekonomi kreatif Papua;
- d. Pemanfaatan Akses dari Bandara ke Akomodasi maupun Venue sebagai Etalase Produk Ekonomi Kreatif Papua dan Potensi Obyek Wisata di Papua;
- e. Aglomerasi Etalase produksi Kegiatan Ekonomi Kreatif dan Obyek Wisata Papua → Dengan Pembangunan Node-Node Etalase Ekonomi Kreatif yang mengelompok dan dilengkapi dengan pusat informasi sekaligus agen transportasinya;
- f. Promosi untuk Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan dilakukan pada tiap Bandara dan Pelabuhan sbg Port utama Tiap Daerah;
- g. Antara Port utama dengan Venue maupun Akomodasi (di Perkotaan), dikembangkan **Rest Area Promosi** sebagai Lokasi Promosi sekunder;
→ Pada Rest Area Promosi disediakan layanan:
 - h. Tempat Makan dan Minum;
 - i. Tempat Ibadah;
 - j. Layanan internet dengan jaringan wifi gratis / berbayar;
 - k. Promosi wisata dan produk ekonomi kreatif Papua;
 - l. Agen layanan transportasi (untuk menuju obyek wisata dan pusat ekonomi kreatif);
 - m. Gardu pandang;
 - n. Layanan perbankan (minimal ATM);
 - o. Pengisian Bahan Bakar;
 - p. Ruang parkir luas dan mudah;
 - q. Tersedia Petugas Keamanan kawasan.

Tabel 6.33 Lokasi dan Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Kabupaten / Kota	Rest Area Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif
1	Kota Jayapura	1. Skyland 2. Lahan Kosong yang aman dan memungkinkan pengembangan Node yang terletak antara Abepura dan Koya Koso
2	Kabupaten Jayapura	1. Lahan Kosong dekat Danau Sentani, antara Bandara Sentani dan Kampung Harapan 2. Pusat Perdagangan dekat rencana Pasar Mama mama Papua 3. Pusat Perdagangan dan jasa dekat Bandara Sentani
3	Kabupaten Mimika	1. Lahan kosong yang memungkinkan pengembangan Node pemukiman baru antara Bandara dengan Kuala Kencana dan Mimika Sport Kompleks 2. Dekat area Puncak Cartenz
4	Kabupaten Biak Numfor	1. Area Pantai Bosnich 2. Lahan kosong di sekitar batas wilayah perkotaan dan dekat bandara
5	Kabupaten Merauke	1. Sekitar perkotaan Merauke 2. Antara kelap lima dan sirkuit taman pinang
6	Kabupaten Jayawijaya	1. Lahan kosong antara pusat kegiatan dan objek lembah baliem dan pembanguinaarena billiard 2. Lahan kosong dekat distrik Kurulu

Sumber :Analisa dan Kajian 2015

Pada perkembangan untuk menunjang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maka perlu pemograman yang dilakukan oleh pihak Dinas terkait, dan untuk menjadikan destinasi tujuan bagi para atlit dan pendukung yang akan berubah menjadi pelancong untuk mengenal Papua dan berwisata di daerah dan kawasan kabupaten / Kota penyelenggara dan kawasan berikat pada ke lima wilayah penyelenggara PON XX.

Berikut adalah hal utama yang menjadi rencana pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif pada masing masing wilayah penyelenggara PON XX di provinsi papua.

Tabel 6.34 Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Jayapura

No.	Usulan Program	Lokasi
1	Bander Tourism Map di Alun-alun Kota Jayapura	Taman Imbi Pusat Kota Jayapura
2	Pusat Informasi Pariwisata	Pelabuhan Jayapura
3	Pembangunan Gazebo, Shelter, dan Pondok Wisata di Kawasan Pantai Base-G	Pantai Base-G
4	Pembangunan Gazebo, Shelter, dan Pondok Wisata di Kawasan Pantai Hamadi	Pantai Hamadi
5	Pembangunan Gazebo, Shelter, dan Pondok Wisata di Kawasan Pantai Holtekamp	Pantai Holtekamp
6	Pembangunan Homestay di Kawasan Perbatasan RI - PNG	Skow
7	Pengurusan dan Penataan Ulang Kawasan Eks Expo Maena untuk 5 (lima) Wilayah Budaya Adat Sebagai Kawasan Wisata	Waena
8	Penataan Taman Wisata Bukit Skyline	
9	Dukungan dan Penguatan kepada Kelompok Usaha Wisata Minuman Kelapa Bukit Skyline	
10	Penataan dan Pembangunan Hotel Numbay	Kota Jayapura
11	Penataan dan Peningkatan Wisata Teluk Humbolt (Landscape)	
12	Penataan Kawasan Jayapura City	Polimak
13	Pengadaan Mobil Makanan (foodtruck) wisata kuliner Kawasan Jayapura City	Polimak

Sumber :

1. Analisa dan Kajian 2015
2. Rencana Pengembangan Dinas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tabel 6.35 Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Jayapura

No.	Usulan Program	Lokasi
1	Pusat Informasi Pariwisata	Bandara Sentani
2	Rehabilitasi Taman Wisata Pemandian Alam	Kampung Harapan
3	Penataan Kampung Wisata Nolakla	Kampung Harapan
4	Pembangunan Kampung Atraksi Utama	Khalkote, Sentani
5	Dukungan dan Penguatan Kelompok Usaha Seni Musik	Kab. Jayapura
6	Dukungan dan Penguatan Kelompok Fotografer	Kab. Jayapura
7	Pembangunan Jalan Wisata	Kampung Harapan - Ifar Gunung (Tugu MacArthur)
8	Pembangunan Rumah Berlabuh Keramba Ikan Danau Sentani	Kab. Jayapura

Sumber :

1. *Analisa dan Kajian 2015*
2. *Rencana Pengembangan Dinas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

Tabel 6.36 Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika

No.	Usulan Program	Lokasi
1	Pusat Informasi Pariwisata	Bandara Mimika
2	Dukungan dan Penguatan serta Pengembangan Pelaku Wisata Huatan Bakau	Kab. Mimika
3	Pembangunan Homestay di Puncak Cartenz	Kab. Mimika
4	Dukungan dan Penguatan Masyarakat Sadar Wisata di Puncak Cartenz	Kab. Mimika

Sumber :

1. *Analisa dan Kajian 2015*
2. *Rencana Pengembangan Dinas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

Tabel 6.37 Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Biak Numfor

No.	Usulan Program	Lokasi
1	Pelaksanaan Sail Teluk Cendrawasih	Kab. Biak Numfor
2	Penataan dan Dukungan bagi Objek wisata Gua Jepang	Kab. Biak Numfor
3	Penataan dan Pengembangan Kebun wisata Bunga Anggrek	Kab. Biak Numfor
5	Penataan dan Pengembangan Wisata Danau Biru	Kab. Biak Numfor
6	Pembangunan Agrowisata Sayuran dan Buah-buahan Organik	Kab. Biak Numfor
7	Pelatihan dan Penguatan Bagi Kelompok Usaha Industri Wisata Ekonomi Kreatif	Kab. Biak Numfor
8	Dukungan dan Penguatan Kelompok Seni Musik dan Atraksi Budaya	Kab. Biak Numfor

Sumber :

1. *Analisa dan Kajian 2015*
2. *Rencana Pengembangan Dinas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

Tabel 6.38 Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Merauke

No.	Usulan Program	Lokasi
1	Pusat Informasi Pariwisata	Kab. Merauke
2	Pembangunan Taman Wisata Pemandian Alam Air Panas	Kab. Merauke
3	Dukungan dan Penguatan Bagi Kelompok Pelaku Seni Kreatif	Distrik Kimam, Kab. Merauke
4	Penataan dan Pengembangan Taman Wisata Nasional Wasur	Kab. Merauke
5	Pelatihan dan Penguatan Bagi Kelompok Usaha Industri Wisata Ekonomi Kreatif	Wilayah Budaya Adat Ha Anim
6	Pembangunan Penangkaran Rusa dan Kangguru	Kab. Merauke
7	Dukungan dan Penataan Taman Rekreasi Wisata Kolam Pemancingan Ikan wilayah Budaya Ada Ha Anim	Wilayah Budaya Adat Ha Anim
8	Survei dan Penataan Taman Wisata Hutan Bakau	Kab. Merauke

Sumber :

1. *Analisa dan Kajian 2015*
2. *Rencana Pengembangan Dinas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

Tabel 6.39 Area Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Jayawijaya

No.	Usulan Program	Lokasi
1	Pusat Informasi Pariwisata	Bandara Wamena
2	Pelatihan dan Penguatan Bagi Kelompok Usaha Industri Wisata Ekonomi Kreatif	Kab. Jayawijaya
3	Dukungan dan Penguatan Media Pengolah Minyak Buah Merah di Kawasan wisata Berikat dan Penyangga	Kab. Jayawijaya
4	Pembangunan Agrowisata Sayuran dan Buah-buahan Organik	Kab. Jayawijaya
5	Pembangunan Homestay/ Honai Adat dan taman Pemandian Alam di Tugu Masuknya Injil (Tugu Hukumiarek Asso)	Kab. Jayawijaya
6	Penataan Lokasi Wisata Tempat Mumi	Kab. Jayawijaya
7	Penataan Taman Wisata Air Garam	Kab. Jayawijaya

Sumber :

1. *Analisa dan Kajian 2015*
2. *Rencana Pengembangan Dinas Provinsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*

6.9 Kebutuhan Ketenagakerjaan Dan Rencana Pengembangan

6.10.1 Ketenagakerjaan

PON ke XX di Provinsi Papua merupakan event nasional dan membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup banyak. Sumberdaya manusia tersebut dibutuhkan sebagai tenaga kerja pada sebelum, saat, dan sesudah event PON ke XX di Provinsi Papua berlangsung. Tenaga kerja sebelum event dibutuhkan saat pembangunan venue-venue di 1 kota dan 5 kabupaten lokasi terpilih pelaksanaan cabang olahraga. Tenaga kerja saat event dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan event seperti panitia bidang, perangkat pertandingan, dan pelaku ekonomi kreatif. Tenaga kerja setelah event dibutuhkan untuk menjaga aset-aset pasca-event dan pelaku ekonomi kreatif.

6.10.2 Tenaga Kerja Pembangunan

Dalam pembangunan venue-venue pelaksanaan cabang olahraga dibutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak guna merampungkan venue tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil asumsi, dibutuhkan sebanyak 2.000 tenaga kerja untuk dapat menyelesaikan venue-venue di 1 kota dan 5 kabupaten yang terpilih dalam pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua. Perlu ada proporsi tenaga kerja agar tenaga lokal dapat diberdayakan dan berkontribusi dalam pembangunan venue dalam pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua. Oleh karena itu, proporsi yang sesuai adalah 60% tenaga lokal dan 40% tenaga luar atau pendatang. Dengan kata lain, dibutuhkan 1.200 tenaga kerja lokal dan 800 tenaga kerja luar atau pendatang.

6.10.3 Panitia Bidang

Panitia bidang tergabung dalam panitia besar dalam pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan PON dibutuhkan 14 bidang yang bertugas pada bidang-bidang tertentu. Bidang-bidang tersebut ditentukan berdasarkan tugas dan fungsi yang sudah disepakati bersama. Panitia bidang terdiri atas :

1. Bidang Sekretariat;
2. Bidang Keamanan;
3. Bidang Pemasaran, Dana, dan Usaha;
4. Bidang Sumber Daya Manusia;
5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertandingan;

6. Bidang Sarana dan Prasarana Jalan;
7. Bidang Transportasi;
8. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
9. Bidang Upacara;
10. Bidang Akomodasi dan Konsumsi;
11. Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media;
12. Bidang Hubungan Daerah dan Protokol;
13. Bidang Pertandingan PON; dan
14. Bidang Kesehatan.

Setiap bidang terdiri atas:

1. PB/ Panitia Daerah/ Panitia Sub-KC/Kota;
2. Panitia Pelaksana Cabang Olahraga;
3. Satuan Tugas Venue;
4. Tenaga Administrasi;
5. Liaison Office (LO);
6. Sukarelawan;
7. Pesuruh/ Worforce/ Satpam;
8. Pelaku Upacara; dan
9. Tenaga Lainnya.

Dari keempat belas bidang tersebut membutuhkan sumberdaya manusia sebanyak 17.223 orang yang rinciannya terdapat pada.

Tabel 6.40 Rincian Kebutuhan SDM Panitia Bidang

No.	Bidang	PB/ Panitia Daerah/ Panitia Sub-KC/Kota	Panpel Cabor	Satgas Venue	Tenaga Administ rasi	Liaison Office (LO)	Sukarelawan	Workforce / Pesuruh/ Satpam	Pelaku Upacara	Tenaga Lainnya	Jumlah
1	Sekretariat	15			10						25
2	Keamanan							670			670
3	Pemasaran Dana dan Usaha (PDU)				26						26
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	24					818				842
5	Sarana dan Prasarana Pertandingan			118				600			718
6	Sarana dan Prasarana Jalan										-
7	Transportasi				4		208	444			656
8	Teknologi Informasi dan Komunikasi									804	804
9	Upacara				40			140	715		895
10	Akomodasi dan Konsumsi				26		564				590
11	Penyiaran dan Pelayanan Media (PPM)				3					330	333
12	Hubungan Daerah dan Protokol (HDP)				4	136	35				175
13	Pertandingan PON		8.591		3	1.385					9.979
14	Kesehatan				2					1.508	1.510
Jumlah											17.223

6.10.4 Perangkat Pertandingan

Panitia pelaksana adalah panitia yang bertugas saat pertandingan berlangsung. Kebutuhan SDM panitia pelaksana sebanyak 14.344 orang yang tersebar di 40 cabang olahraga dan 5 kabupaten serta 1 kota. Panitia pelaksana bertugas saat pelaksanaan pertandingan. Panitia pelaksana terdiri atas:

1. Technical Delegate;
2. Dewan Hakim;
3. Panitia Inti;
4. Ketua Bidang;
5. Anggota;
6. Anggota Bidang dan Petugas Konsumsi;
7. Petugas Lapangan;
8. LO;
9. Petugas UPP;
10. Dokter Pertandingan; dan
11. PP/ Wasit/ Juri.

Rincian jumlah panitia pelaksana dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.41 Rincian SDM Panitia Pelaksana

Lokasi	Cabang Olah Raga yang Dipertandingkan	Technical Delegate	Dewan Hakim	Panitia Inti	Ketua Bidang	Anggota	Anggota Bidang + Petugas Konsumsi	Petugas Lapangan	LO	Petugas UPP	Dokter Pertandingan	PP/Wasit/Juri			Jumlah
												INTR	NAS	Asisten Wasit	
Kota Jayapura	Gantole	1	3	5	9	30	32	52	23	8	-	-	17	-	180
	Paralayang	1	3	5	13	13	17	26	23	8	-	3	10	20	142
	Paramotor	1	3	5	13	13	17	26	23	8	-	3	10	20	142
	Terbang Layang	1	5	5	15	81	85	33	23	8	-	10	15	10	291
	Renang Perairan Terbuka	1	3	5	4	15	39	10	23	8	-	2	31	30	171
	Angkat Besi	1	-	5	10	10	14	20	23	8	1	12	19	-	123
	Angkat Berat	1	-	5	10	10	14	20	23	8	1	8	21	-	121
	Binaraga	1	-	5	10	10	14	20	23	8	1	8	21	-	121
	Sepeda BMX	1	3	5	13	20	26	75	29	8	-	2	20	22	224
	Baseball	1	3	5	5	7	19	25	15	8	-	7	15	5	115
	Softball	1	3	5	5	7	19	25	15	8	-	7	15	5	115
	Voli Indoor	1	3	5	4	9	13	108	23	8	-	18	10	19	221
	Bridge	1	5	5	11	22	26	7	23	8	-	2	7	14	131
	Catur	1	3	5	7	15	21	7	16	6	-	8	27	11	127
	Criket	1	3	5	10	14	18	22	23	8	-	-	13	-	117

Lokasi	Cabang Olah Raga yang Dipertandingkan	Technical Delegate	Dewan Hakim	Panitia Inti	Ketua Bidang	Anggota	Anggota Bidang +	Petugas Lapangan	LO	Petugas UPP	Dokter Pertandingan	PP/Wasit/Juri			Jumlah
Kabupaten Jayapura	Dansa	1	3	5	10	10	14	20	23	8	-	-	30	-	124
	Judo	1	3	5	10	30	34	28	28	8	2	9	14	2	174
	Kempo	1	3	5	10	30	34	28	28	8	2	9	14	2	174
	Panahan	1	3	5	8	14	18	44	23	8	-	7	20	-	151
	Panjat Tebing	1	3	5	4	15	39	10	23	8	-	2	31	30	171
	Pencak Silat	1	3	5	10	30	34	56	23	8	2	9	36	10	227
	Senam Laut	1	3	5	6	40	44	40	20	8	-	4	15	40	226
	Sepak Bola (Penyisihan)	1	3	5	13	20	26	75	29	8	-	2	20	22	224
	Futsal	1	3	5	8	8	12	34	23	8	-	4	24	-	130
	Sepatu Roda	1	3	5	10	39	44	20	15	8	4	5	25	5	184
	Tarung Derajat	1	3	5	20	40	44	90	23	8	4	20	50	-	308
	Tenis Indoor	1	3	5	6	21	25	52	23	8	-	14	30	20	208
	Tenis Outdoor	1	3	5	6	21	25	52	23	8	-	14	30	20	208
	Tenis Meja	1	3	5	9	30	34	25	23	8	-	5	20	30	193
	Wushu	1	3	5	20	40	44	90	23	8	4	20	50	-	308
Kabupaten Jayapura	Renang	1	4	5	6	39	43	45	23	8	-	15	54	-	243
	Renang Indah	1	4	5	6	39	43	45	23	8	-	15	54	-	243

Lokasi	Cabang Olah Raga yang Dipertandingkan	Technical Delegate	Dewan Hakim	Panitia Inti	Ketua Bidang	Anggota	Anggota Bidang +	Petugas Lapangan	LO	Petugas UPP	Dokter Pertandingan	PP/Wasit/Juri			Jumlah
	Loncat Indah	1	4	5	6	39	43	45	23	8	-	15	54	-	243
	Polo Air	1	4	5	6	39	43	45	23	8	-	15	54	-	243
	Selam Kolam	1	3	5	6	40	44	40	20	8	-	4	15	40	226
	Atletik	2	3	5	8	8	12	248	23	8	3	14	30	20	384
	Balap Sepeda	1	3	5	13	20	26	75	29	8	-	2	20	22	224
	Sepeda Track	1	3	5	13	20	26	75	29	8	-	2	20	22	224
	Voli Pantai	1	3	5	4	9	13	97	23	8	-	16	20	8	207
	Canoceing	2	3	5	6	14	18	71	30	8	-	10	36	-	203
	Rowing	2	3	5	6	14	18	71	30	8	-	10	36	-	203
	Traditional boat	2	3	5	6	14	18	71	30	8	-	10	36	-	203
	Drumband Indoor	1	3	5	10	20	40	15	12	7	-	-	26	16	155
	Drumband Outdoor	1	3	5	10	20	40	15	12	7	-	-	26	16	155
	Menembak	1	3	5	10	46	50	80	23	8	-	2	24	5	257
	Sepakbola (Penyisihan)	1	3	5	10		56	80	24	8	-	8	44	-	239
	Sepakbola (Final)	1	3	5	10		56	80	24	8	-	8	44	-	239
	Sepak Takraw	1	3	5	10		56	80	24	8	-	8	44	-	239

Lokasi	Cabang Olah Raga yang Dipertandingkan	Technical Delegate	Dewan Hakim	Panitia Inti	Ketua Bidang	Anggota	Anggota Bidang +	Petugas Lapangan	LO	Petugas UPP	Dokter Pertandingan	PP/Wasit/Juri			Jumlah
Kab. Mimika	Bowling	1	3	5	9	20	24	20	23	8	-	2	12	2	129
	Bulutangkis	1	3	5	9	16	20	13	23	8	-	6	10	32	146
	Golf	1	3	5	16	30	34	53	23	8	-	15	15	23	226
	Gulat	1	3	5	10	10	14	30	23	8	2	15	30	10	161
	Squash	2	3	5	10	14	20	70	24	8		10	30		196
	Tinju	1	3	5	10	30	34	56	23	8	2	9	36	10	227
Kab. Merauke	Anggar	1	3	5	7	30	34	45	23	8	-	10	14	-	180
	Balap Kuda	1	5	5	15	81	85	33	23	8	-	10	15	10	291
	Equestrian (Ketangkasan)	1	5	5	15	81	85	33	23	8	-	10	15	10	291
	Bermotor	1	3	5	7	15	19	35	23	8	-	1	8	5	130
	Basket	1	5	5	11	52	72	10	23	8	2	15	23	-	227
	Karate	1	3	5	10	38	42	20	23	8	6	24	65	-	245
	Taekwondo	1	3	5	20	40	44	90	23	8	4	20	50	-	308
Kab. Biak Numfor	Aeromodeling	1	3	5	11	16	20	32	23	8	-	1	21	8	149
	Terjun Payung	1	5	5	15	81	85	33	23	8	-	10	15	10	291
	Bermotor	1	3	5	7	15	19	35	23	8	-	1	8	5	130
	Hoki Indoor	1	3	5	7	18	22	20	23	8	-	6	15	9	137

Lokasi	Cabang Olah Raga yang Dipertandingkan	Technical Delegate	Dewan Hakim	Panitia Inti	Ketua Bidang	Anggota	Anggota Bidang +	Petugas Lapangan	LO	Petugas UPP	Dokter Pertandingan	PP/Wasit/Juri			Jumlah
	Hoki Outdoor	1	3	5	7	18	22	20	23	8	-	6	15	9	137
	Layar	1	3	5	11	16	20	32	23	8	-	1	21	8	149
	Sepakbola (Penyisihan)	1	3	5	10		56	80	24	8	-	8	44	-	239
	Sepeda Gunung	1	3	5	13	20	26	75	29	8	-	2	20	22	224
Kab. Jayawijaya	Billiar	1	3	5	9	26	30	34	20	8	-	6	21	21	184
	Sepakbola (Penyisihan)	1	3	5	10		56	80	24	8	-	8	44	-	239
	Muaythai	1	3	5	10	30	34	56	23	8	2	9	36	10	227
Jumlah		77	223	360	694	1.742	2.407	3.423	1.661	572	42	573	1.880	690	14.344

6.10.5 Tenaga Kerja Pasca-PON

Setelah terselenggaranya PON XX di Provinsi Papua maka aset-aset PON perlu dikelola dan dijaga dengan baik. Aset-aset tersebut memiliki manfaat jangka panjang khususnya dalam pengembangan atlet-atlet dari Papua. Maka dari itu, diperlukan tenaga kerja untuk dapat menjadi pengelola dan menjaga aset-aset Pasca-PON. Tenaga kerja tersebut terbentuk dalam suatu badan pengelola di bawah arahan pemerintah daerah. Badan tersebut selanjutnya disebut dengan Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga. Struktur organisasi Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.9 Struktur Organisasi Badan Pengelola Sarana dan Prasarana

Dalam organisasi tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 271 tenaga kerja, yang terdiri atas 1 orang direktur utama, 18 orang direktur bawahannya, 12 orang sekretaris direksi, 30 orang ketua bidang, dan 210 orang staf bidang. Jumlah tenaga kerja tersebut bertugas untuk mengelola aset di seluruh venue yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota pelaksana PON XX di Provinsi Papua.

Tabel 6.42 Rincian Anggota Badan Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga

	Kota Jayapura	Kabupaten Jayapura	Kabupaten Mimika	Kabupaten Merauke	Kabupaten Biak Numfor	Kabupaten Jayawijaya	Jumlah
Direktur Utama							1
Direktur Operasional	1	1	1	1	1	1	6
Kepala Bidang Kerjasama	1	1	1	1	1	1	6
Staf Promosi	5	5	5	5	5	5	30
Staf Sponsor dan Pembiayaan	5	5	5	5	5	5	30
Direktur Teknis	1	1	1	1	1	1	6
Kepala Bidang Pemeliharaan	1	1	1	1	1	1	6
Staf Pemeliharaan Berjangka	5	5	5	5	5	5	30
Staf Pemeliharaan Harian	5	5	5	5	5	5	30
Direktur Umum	1	1	1	1	1	1	6
Kepala Bidang Keuangan	1	1	1	1	1	1	6
Staf Keuangan	5	5	5	5	5	5	30
Kepala Bidang SDM	1	1	1	1	1	1	6
Staf SDM	5	5	5	5	5	5	30
Kepala Bidang Pengawas Internal	1	1	1	1	1	1	6
Staf Pengawas Internal	5	5	5	5	5	5	30
Sekretaris Direksi	2	2	2	2	2	2	12
	Total						271

6.10.6 Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

PON ke XX tahun 2020 memberikan dampak yang amat besar bagi Provinsi Papua. Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan event besar tersebut akan dibanjiri oleh perwakilan masing-masing provinsi dari seluruh Indonesia. Para perwakilan tersebut tentu tidak hanya datang untuk bertanding saja tetapi juga menikmati keindahan alam melalui kegiatan pariwisata di tanah cendrawasih ini. Maka dari itu, Papua perlu berbenah diri dalam mendukung kebutuhan tersebut terutama dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelaku pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah seluruh masyarakat Papua. Maka dari itu, perlu ada pengembangan ketenagakerjaan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah perlu menggali dan memberdayakan masyarakat Papua untuk dapat mengelola sektor pariwisata dan membuat produk-produk yang bernilai ekonomi, dengan begitu perekonomian Papua dapat bangkit. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini memiliki potensi yang besar dan berjangka panjang sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan.

6.10 Ruang Fiskal sebagai bentuk kemampuan pembiayaan pembiayaan

- a. Ruang Fiskal Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2014 sekitar 37%, masih tingginya pendapatan, baik yang berasal dari DAU, DAK dan Dana Otsus yang dikurangi hibah serta pembiayaan yang bersifat rutin, menjadikan Provinsi Papua mampu mengalokasikan pembiayaan infrastruktur yang akan diprioritaskan dalam hal ini untuk pembangunan dalam menghadapi pelaksanaan PON XX;
- b. Pertumbuhan APBD pada tahun 2013-2014 mencapai 41,1% sedangkan untuk 2014-2015 menjadi 6,51% hal tersebut mengindikasikan bahwa Provinsi Papua memiliki kapasitas pendanaan dan belanja yang terus meningkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir;
- c. Pada tahun 2014 belanja bantuan keuangan pada prov/kab/kota/desa mencapai 4,54 Triliun sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,57 Triliun;
- d. Tercatat dalam komponen Pembiayaan APBD dari tahun 2013-2015 tidak terdapat pembayaran Pembiayaan yang disebabkan oleh Pembayaran pokok hutang maupun pinjaman daerah.

Mengenai pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas penyediaan infrastruktur, menurut Perpres ini, bersumber dari :

- a) Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif;
- b) Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*): dan atau
- c) Bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Dengan pertimbangan ruang fiskal yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Kota/Kabupaten dalam pembiayaan Pembangunan dan rehabilitasi Venue serta wisma, maka pilihannya adalah dengan menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*).

6.11 Rencana Pemanfaatan Aset Pasca Event PON X di Provinsi Papua

- a. Dimanfaatkan mendukung Papua sbg Pusat Pembinaan & Pendidikan OR Prestasi Internasional di Indonesia Timur dan Rumpun Melanisia;
- b. Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan / Event OR Besar Nasional/ Internasional dalam kalender tetap (periodik);
- c. Pendirian Universitas Olahraga Prestasi Internasional tidak jauh dari lokasi Venue utama PON, → yang diberi kemudahan/akses pemanfaatan aset OR di Papua.

6.12 Skenario Pembiayaan PON XX

6.13.1 Alokasi Kebutuhan Dana Penyelenggaraan PON

Pelaksanaan PON XX pada tahun 2020 di Provinsi Papua, dalam proses pelaksanaannya nanti dibutuhkan pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur utama PON seperti venue penyelenggaraan maupun infrastruktur pendukung seperti, jalan, energi, telekomunikasi dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya nanti pemerintah Provinsi Papua dan Kota/Kabupaten penyelenggara harus pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mensukseskan PON XX, sehingga dalam kurun waktu tiga tahun kedeoan proses pembangunan harus sudah dimulai dan pada tahun 2020 semuanya harus sudah siap digunakan.

Proses pembiayaan pembangunan infrastruktur nantinya akan dibagi menjadi empat pihak, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten serta dilibatkannya pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

6.13.2 Kemampuan Keuangan Pemerintah (APBD Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Penyelenggara)

Dalam upaya untuk mensukseskan pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua, sebagai penyelenggara PON yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Untuk itu pelaksanaan PON XX di Provinsi Papua memerlukan suatu Rencana Pembangunan dan Pengembangan untuk mengarahkan berbagai langkah-langkah untuk pembangunan berbagai sarana prasarana dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, serta pengembangan sektor ekonomi untuk menunjang pelaksanaan PON XX dan memberikan dampak terhadap pengembangan wilayah maupun dampak langsung terhadap pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua saat pelaksanaan PON maupun setelah PON selesai.

Untuk perkembangan fiskal, secara keseluruhan, realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua pada triwulan III 2015 belum optimal. Secara historis, realisasinya juga jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama, mengingat pagu APBD 2015 mengalami kenaikan signifikan dibanding 2014.

Meski memperoleh peningkatan pagu yang signifikan pada tahun anggaran 2015 ini, namun realisasinya masih belum optimal bahkan secara nominal lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Secara alokasi, Belanja Modal mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp2,79 triliun untuk 2015 (naik 22% dari Rp2,27 triliun). Sementara itu untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur, Belanja tidak langsung Belanja Pegawai juga meningkat dari Rp 880.47 miliar menjadi 909.42 miliar (naik 7%), sedangkan untuk belanja langsung belanja pegawai, meningkat dari 167.65 miliar menjadi 202.29 miliar pada tahun 2015 untuk Provinsi Papua.

Jika dilihat dari APBD Untuk Kota/Kabupaten penyelenggara, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayawijaya mengalami peningkatan dari sisi pendapatan lebih dari 30% dibandingkan Tahun Anggaran 2014. Sedangkan dilihat dari sisi belanja, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan diatas 25% dibandingkan Tahun Anggaran 2014.

Tabel 6.43 Tabel PAD pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	Prov. Papua	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Kab. Merauke	Kab. Biak Numfor	Kab. Jayawijaya
	1	2	3	4	5	6
Pendapatan	11,357,407	1,230,121	1,084,940	1,897,577	1,000,383	1,159,481
PAD	876,587	126,424	59,189	119,823	59,085	45,214
Pajak daerah	649,442	88,438	15,892	16,503	11,310	7,906
Retribusi daerah	59,331	28,036	16,021	59,682	9,358	11,338
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	45,225	6,000	4,300	10,324	600	6,000
Lain-lain PAD yang sah	122,590	3,950	22,976	33,314	37,817	19,970
Dana Perimbangan	3,083,243	780,567	751,047	1,510,802	693,687	812,944
DBH	640,007	61,820	59,295	87,092	41,785	46,390
DAU	2,277,933	641,368	621,020	1,215,754	550,028	638,050
DAK	165,304	77,378	70,733	207,956	101,875	128,503
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7,397,576	323,130	274,704	266,952	247,611	301,323
Hibah				1,250	1,250	
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya		44,184	16,210	25,781	14,664	11,334
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	5,397,576	95,555	187,148	202,822	100,104	219,905
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya			71,346	37,100	29,970	70,084
Lain-lain	2,000,000	183,391			101,622	
Belanja	11,935,509	1,260,121	1,141,006	2,011,310	1,022,964	1,159,481
Belanja Tidak Langsung	6,820,148	607,793	584,212	894,197	508,320	540,693

Uraian	Prov. Papua	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Kab. Merauke	Kab. Biak Numfor	Kab. Jayawijaya
	1	2	3	4	5	6
Belanja Pegawai	944,428	566,040	424,276	624,286	381,363	344,229
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi						12,602
Belanja Hibah	866,922	22,000	39,099	73,100	60,393	26,182
Belanja Bantuan sosial	105,034	15,000	4,814	10,082	2,000	1,500
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	295,886	2,753				
Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	4,577,877		113,523	184,728	64,065	152,180
Belanja tidak terduga	30,000	2,000	2,500	2,000	500	4,000
Belanja Langsung	5,115,361	652,329	556,794	1,117,114	514,644	618,787
Belanja Pegawai	202,292	83,215	68,428	102,935	34,459	71,002
Belanja Barang dan jasa	2,119,811	379,686	268,779	524,378	282,848	251,491
Belanja Modal	2,793,258	189,427	219,587	489,801	197,337	296,294
Pembiayaan Netto	578,102	30,000	56,066	113,733	22,581	
Penerimaan Pembiayaan	628,102	40,000	114,066	121,733	22,581	
SiLPA TA sebelumnya	378,102	40,000	114,066	121,733		
Pencairan dana cadangan	250,000					
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah					22,581	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
Pengeluaran Pembiayaan	50,000	10,000	58,000	8,000		

Uraian	Prov. Papua	Kota Jayapura	Kab. Jayapura	Kab. Merauke	Kab. Biak Numfor	Kab. Jayawijaya
	1	2	3	4	5	6
Pembentukan Dana Cadangan			50,000			
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	50,000	10,000	8,000	8,000		
Pembayaran Pokok Utang						
Pemberian Pinjaman Daerah						
Pembayaran Kegiatan Lanjutan						
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga						

Sumber : Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

6.13.3 Kapasitas Fiskal Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Penyelenggara

Kapasitas Fiskal Daerah didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.07/2015 Tentang Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Provinsi Papua dan Kota/Kabupaten penyelenggara PON XX dalam membiayai program, dikarenakan salah satu kriteria daerah untuk mengajukan pinjaman daerah harus memperlihatkan peta kapasitas fiskalnya.

untuk menghitung Kapasitas fiskal, berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.07/2015, memiliki formulasi sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + Otsus + Transfer Prov + LP) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

Keterangan:

KF	=	Kapasitas Fiskal
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DBH	=	Dana Bagi Hasil
DAU	=	Dana Alokasi Umum
Otsus	=	Dana Otonomi Khusus
Transfer Prov	=	Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota (bernilai positif untuk Kabupaten/Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi)
LP	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BP	=	Belanja Pegawai

Hasil perhitungan tersebut memberikan kriteria nilai indeks dengan batasan Indeks kapasitas fiskal lebih dari 2 (≥ 2) berarti daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal tinggi, daerah yang memiliki indek kapasitas fiskal lebih dari 1 sampai dengan 2 ($1 \leq IKF < 2$) maka daerah tersebut dikategorikan memiliki kapasitas fiskal tinggi, daerah yang memiliki indek kapasitas fiskal lebih dari 0,5 sampai dengan 1 ($0,5 \leq IKF < 1$) maka daerah tersebut dikategorikan memiliki kapasitas fiskal sedang, dan daerah yang memiliki indek kapasitas fiskal kurang dari dari 0,5 ($\leq 0,5$) maka daerah tersebut dikategorikan memiliki kapasitas fiskal rendah

Berdasarkan kepada PMK Nomor 33/PMK.07/2015, menyatakan bahwa indeks kapasitas fiskal untuk Provinsi Papua adalah sebesar 0,95 atau masuk kategori sedang, kemudian untuk Kota/kabupaten penyelenggara hasil perhitungan indeks kapasitas fiskalnya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.44 Tabel Indeks Kapasitas Fiskal

Kota/Kabupaten	Indeks Kapasitas Fiskal	Keterangan
Kota Jayapura	0,54	Sedang
Kab. Jayapura	0,91	Sedang
Kab. Merauke	1,61	Tinggi
Kab. Biak Numfor	0,29	Rendah
Kab. Jayawijaya	0,27	Rendah

sumber : PMK Nomor 33/PMK.07/2015

Berdasarkan kepada tabel tersebut, kabupetan Merauke memiliki kapasitas fiskal yang tinggi, sedangkan Provinsi Papua, serta Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura masuk kedalam kategori sedang, hal tersebut menyatakan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan untuk membiayai program atau tugas pemerintah karena tidak mengganggu kepada belanja rutin, dalam hal ini untuk mengajukan pinjaman daerah untuk kegiatan PON XX. Sedangkan untuk Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayawijaya memiliki kategori indeks kapasitas fiskal rendah, hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua kabupaten tersebut akan memiliki keterbatasan atau fleksibilitas anggaran dalam pengelolaan program atau tugas pemerintah tersebut.

6.13.4 Batas Maksimal Pinjaman Daerah

Kriteria berikutnya dalam rangka pengajuan pinjaman daerah, dengan mengacu kepada PP Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah, menyatakan bahwa batas maksimal yang dipersyaratkan untuk mengajukan pinjaman ditambah sisa pinjaman tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dalam hal ini untuk perencanaan pinjaman pada tahun anggaran 2016, dengan mengacu kepada APBD tahun anggaran 2015.

secara rincinya untuk masing-masing daerah adalah sebagai berikut :

Provinsi Papua (Dalam Rupiah)	
Koponen A	
Pendapatan Daerah	11,357,406.83
Komponen B	
DAK	165,303.52
Dana Darurat	
Pembayaran Pokok Utang	
Jumlah	165,303.52
Penerimaan Umum APBD 2015	
Komponen A	11,357,406.83
Komponen B	165,303.52
	11,522,710.35
Maksimum Pinjaman	= 75% x Penerimaan Umum APBD tahun 2015
	= 75% x 11,522,710.35
	= 8,642,032.76
Sisa Pinjaman TA 2014	=
Rencana Pinjaman TA 2016	= 1,708,405.32
Total Pinjaman	= 1,708,405.32
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2016	
	= 1,708,405.32
	11,522,710.35
	= 14.83% ≤ 75%

Rasio perbandingan jumlah pinjaman dengan jumlah penerimaan umum APBD untuk Provinsi Papua sebesar 14.83%, masih di bawah batas maksimal sebesar 75%. Sehingga Provinsi Papua dikategorikan memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal Rp. 1.708 triliun.

Kota Jayapura (Dalam Rupiah)		
Koponen A		
Pendapatan Daerah	=	1,230,121.23
Komponen B		
DAK	=	77,378.21
Dana Darurat		
Pembayaran Pokok Utang		
Jumlah	=	77,378.21
Penerimaan Umum APBD 2015		
Komponen A		1,230,121.23
Komponen B		77,378.21
		1,307,499.44
Maksimum Pinjaman		
	=	75% x Penerimaan Umum APBD tahun 2015
	=	75% x 1,307,499.44
	=	980,624.58
Sisa Pinjaman TA 2014		
	=	
Rencana Pinjaman TA 2016	=	96,719.74
Total Pinjaman	=	96,719.74
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2016		
	=	96,719.74
		1,307,499.44
	=	7.40% ≤ 75%

Rasio perbandingan jumlah pinjaman dengan jumlah penerimaan umum APBD untuk Kota Jayapura sebesar 7.40%, masih di bawah batas maksimal sebesar 75%. Sehingga Kota Jayapura dikategorikan memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal Rp. 96.71 miliar.

Kabupaten Jayapura (Dalam Rupiah)			
Koponen A			
Pendapatan Daerah	=		1,084,940.00
Komponen B			
DAK	=	70,733.04	
Dana Darurat			
Pembayaran Pokok Utang			
Jumlah	=		70,733.04
Penerimaan Umum APBD 2015			
Komponen A		1,084,940.00	
Komponen B		70,733.04	
		1,155,673.04	
Maksimum Pinjaman	=	75% x Penerimaan Umum APBD tahun 2015	
	=	75%	x 1,155,673.04
	=	866,754.78	
Sisa Pinjaman TA 2014	=		
Rencana Pinjaman TA 2016	=	519,749.85	
Total Pinjaman	=	519,749.85	
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2016			
	=	519,749.85	
		1,155,673.04	
	=	44.97%	≤ 75%

Rasio perbandingan jumlah pinjaman dengan jumlah penerimaan umum APBD untuk Kabupaten Jayapura sebesar 44.97%, masih di bawah batas maksimal sebesar 75%. Sehingga Kabupaten Jayapura dikategorikan memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal Rp. 519.74 miliar.

Kabupaten Merauke (Dalam Rupiah)			
Koponen A			
Pendapatan Daerah		=	1,897,577.12
Komponen B			
DAK	=	207,955.89	
Dana Darurat			
Pembayaran Pokok Utang			
Jumlah		=	207,955.89
Penerimaan Umum APBD 2015			
Komponen A			1,897,577.12
Komponen B			207,955.89
			2,105,533.01
Maksimum Pinjaman	=	75% x Penerimaan Umum APBD tahun 2015	
	=	75% x	2,105,533.01
	=	1,579,149.75	
Sisa Pinjaman TA 2014	=		
Rencana Pinjaman TA 2016	=	93,405.07	
Total Pinjaman	=	93,405.07	
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2016			
	=	93,405.07	
		2,105,533.01	
	=	4.44% ≤	75%

Rasio perbandingan jumlah pinjaman dengan jumlah penerimaan umum APBD untuk Kabupaten Merauke sebesar 4.44%, masih di bawah batas maksimal sebesar 75%. Sehingga Kabupaten Merauke dikategorikan memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal Rp. 93.40 miliar.

Kabupaten Biak Numfor (Dalam Rupiah)	
Koponen A	
Pendapatan Daerah	1,000,382.72
Komponen B	
DAK	101,874.59
Dana Darurat	
Pembayaran Pokok Utang	
Jumlah	101,874.59
Penerimaan Umum APBD 2015	
Komponen A	1,000,382.72
Komponen B	101,874.59
	1,102,257.31
Maksimum Pinjaman	= 75% x Penerimaan Umum APBD tahun 2015
	= 75% x 1,102,257.31
	= 826,692.98
Sisa Pinjaman TA 2014	= 22,581.24
Rencana Pinjaman TA 2016	= 125,427.50
Total Pinjaman	= 148,008.74
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2016	
	= 148,008.74
	1,102,257.31
	= 13.43% ≤ 75%

Rasio perbandingan jumlah pinjaman dengan jumlah penerimaan umum APBD untuk Kabupaten Biak Numfor sebesar 13.43%, masih di bawah batas maksimal sebesar 75%. Sehingga Kabupaten Biak Numfor dikategorikan memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal Rp. 148.008 miliar.

Kabupaten Jayawijaya (Dalam Rupiah)	
Koponen A	
Pendapatan Daerah	1,159,480.82
Komponen B	
DAK	128,502.93
Dana Darurat	
Pembayaran Pokok Utang	
Jumlah	128,502.93
Penerimaan Umum APBD 2015	
Komponen A	1,159,480.82
Komponen B	128,502.93
	1,287,983.75
Maksimum Pinjaman	= 75% x Penerimaan Umum APBD tahun 2015
	= 75% x 1,287,983.75
	= 965,987.81
Sisa Pinjaman TA 2014	=
Rencana Pinjaman TA 2016	= 18,900.50
Total Pinjaman	= 18,900.50
Perbandingan Rencana Pinjaman dengan Penerimaan APBD TA 2016	
	= 18,900.50
	1,287,983.75
	= 1.47% ≤ 75%

Rasio perbandingan jumlah pinjaman dengan jumlah penerimaan umum APBD untuk Kabupaten Jayawijaya sebesar 1.47%, masih di bawah batas maksimal sebesar 75%. Sehingga Kabupaten Jayawijaya dikategorikan memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal Rp. 18.9 miliar.

6.13.5 Rasio Tingkat Pengembalian Pinjaman

Kriteria berikutnya yang dipersyaratkan dalam PP 54 tahun 2005 Tentang Pinjaman daerah adalah rasio proyeksi kemampuan mengembalikan pinjaman (Debt Servicer Coverage Ratio/DSCR) paling sedikit 2,5. Formulasi perhitungan DSCR ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{DSCR} = \frac{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran pokok pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \geq 2,5$$

DSCR : Debt Service Coverage ratio

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan Sumber Daya Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan

P : Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo tahun anggaran yang bersangkutan

B : Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

BL : Biaya Lainnya Yang Jatuh Tempo (Biaya komitmen Biaya Bank dan Lain-lain yang jatuh tempo)

Hasil perhitungan DSCR untuk masing-masing daerah penyelenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 6.45 Tabel Perhitungan DSCR Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayawijaya (Dalam Juta Rupiah)

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Komponen A					Komponen B		Komponen C			DSCR
		PAD	BHP/BHBP	DAU	DP OTSUS	BK Prop	Belanja Pegawai Tidak Langsung	Pembayaran Utang Pokok	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Biaya-biaya	
1	Provinsi Papua	876,587	640,007	2,277,933	5,397,576.28		944,428.25	0	427,101.33	42,710.13	4,698.11	17.38147
2	Kota Jayapura	126,424	61,820	641,368	95,555.05	44,184.01	566,039.86	0	24,179.94	2,417.99	265.98	15.01315
3	Kabupaten Jayapura	59,189	59,295	621,020	187,147.85	16,209.65	424,275.75	0	129,937.46	12,993.75	1,429.31	3.592291
4	Kabupaten Merauke	119,823	87,092	1,215,754	202,821.75	25,780.67	624,286.37	0	23,351.27	2,335.13	256.86	39.58582
5	Kabupaten Biak Numfor	59,085	41,785	550,028	100,104.19	14,664.41	381,362.68	0	31,356.87	3,135.69	344.93	11.03132
6	Kabupaten Jayawijaya	45,214	46,390	638,050	219,905.30	11,333.98	344,228.86	0	4,725.12	472.51	51.98	117.4687

sumber : Keuangan Daerah Kemendagri Data APBD 2015 diolah

Berdasarkan kepada hasil perhitungan diatas, bisa diperoleh informasi bahwa seluruh daerah penyelenggara PON XX, memiliki nilai DSCR diatas 2,5 itu berarti bahwa seluruh daerah yang menjadi penyelenggara memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang akan dilakukan untuk pembiayaan infrastruktur PON XX.

6.13.6 Analisa Ekonomi Terhadap Pembiayaan Infrastruktur

Untuk menghitung dampak dari pembangunan/rehabilitasi dan penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua, ada beberapa asumsi yang digunakan antara lain :

1. Penghasilan tenaga kerja mengacu kepada UMP 2016 sebesar Rp. 2,435,000,-
2. jumlah tenaga kerja sebanyak 2000, dengan alokasi 60% penduduk lokal dan 40% penduduk pendatang
3. Konsumsi, 100% untuk penduduk lokal di lakukan di Papua, dan 60% tenaga kerja pendatang dilakukan di papua, sisanya dikirim ke daerah asal
4. *Marginal propensity to consume* (MPC) sebesar 75% dan sisanya ditabung

Dengan mengacu kepada asumsi tersebut, maka diperoleh hitungan multiplier efek sebagai berikut :

Asumsi	Porsi	Nilai	Jumlah	Rata-rata Tahunan	Multiplier Konsumsi
Jumlah Tenaga Kerja		2,000			
Penghasilan		2,435,000			
TK Lokal	60%	1,200	2,922,000,000	35,064,000,000	
TK Pendatang	40%	800	1,948,000,000	23,376,000,000	
				58,440,000,000	
Konsumsi					
TK Lokal	100%	1,200	2,922,000,000	35,064,000,000	140,256,000,000
TK Pendatang	60%	800	1,168,800,000	14,025,600,000	56,102,400,000
Total				49,089,600,000	196,358,400,000

sumber : data 2015 diolah

Berdasarkan kepada tabel perhitungan multiplier efek di atas diperoleh informasi, bahwa rata-rata setiap tahun selama pengerjaan efek pengganda dari konsumsi sebesar Rp. 196.23 miliar

Sedangkan untuk penyelenggaraan, efek pengganda dari sisi konsumsi kontingen, adalah sebagai berikut :

Asumsi	Porsi	Nilai	Jumlah	Rata-rata Tahunan	Multiplier Konsumsi
Jumlah Kontingen		15,000			
Uang saku		2,500,000	37,500,000,000		
Konsumsi	60%			22,500,000,000	90,000,000,000
Oleh-Oleh Cinderamata	20%			7,500,000,000	30,000,000,000

sumber : data diolah

Berdasarkan kepada tabel di atas, bahwa aktivitas PON XX dengan asumsi kontingen yang datang sebanyak 15,000 dengan uang saku sebesar Rp. 2,500,000 mengacu kepada kondisi PON XVIII di Riau, maka diperoleh informasi bahwa efek pengganda yang dihasilkan dari penyelenggaraan tersebut untuk sisi konsumsi sebesar Rp. 30 miliar.

6.13.7 Rasio Tingkat Pengembalian Pinjaman

Skenario Availability Payment

Dengan mengacu kepada Perpres 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, maka pemerintah mengeluarkan skenario *Availability Payment*, *Availability Payment* merupakan salah satu inovasi baru pemerintah yang dirancang untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur. Dalam skema *Availability Payment*, badan usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, termasuk di dalamnya biaya konstruksi dan biaya operasi serta pemeliharaan proyek selama masa konsesi. Investasi tersebut akan dikembalikan secara tahunan (annually) oleh Kementerian, Lembaga Negara atau pemerintah daerah yang bertindak sebagai penanggung jawab proyek (PJPk).

Pihak PJPk akan mulai melakukan pembayaran Availability Payment setelah proyek infrastruktur tersebut mulai beroperasi dan didasarkan pada kualitas layanan infrastruktur yang dihasilkan oleh badan usaha. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang diharapkan membuat roda-roda ekonomi bergerak lebih cepat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari diselenggarakannya PON XX di Provinsi Papua yakni, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi penyelenggara kegiatan PON XX.

Skema Availability Payment memungkinkan PJPk memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana sebelum proyek beroperasi. Proyek-proyek infrastruktur yang kurang layak secara finansial dapat ditawarkan sebagai proyek KPBU. Terkait pengembangan infrastruktur di Sumut, saat ini sudah dijalankan oleh PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia/PII (persero). PT. PII sudah mengcover jaminan pembiayaan terhadap proyek pemerintah di sejumlah daerah seperti pembangunan PLTA di Jabar 3x300 MW, PLTU Sarulla 3x300 MW dengan total pembiayaan mencapai Rp. 65 triliun, proyek sumber air Lampung dan Semarang Barat dengan pembiayaan masing-masing Rp2,5 triliun.

6.13.8 Alternatif Lembaga Pembiayaan Infrastruktur

a. PT . Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero)

PT SMI memiliki peran aktif dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia dan membantu persiapan proyek infrastruktur, baik yang dilakukan melalui layanan konsultasi maupun pengembangan proyek bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

PT SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral.

Sejalan dengan rencana Pemerintah RI untuk mentransformasi PT SMI menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial.

Bisnis utama PT SMI adalah melakukan pembiayaan di bidang infrastruktur. Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur, kegiatan operasional PT SMI tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 yang antara lain mengatur lingkup objek pembiayaan yang terdiri dari infrastruktur transportasi, jalan, pengairan, air minum, air limbah, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, serta infrastruktur lain atas persetujuan Menteri Keuangan.

Produk Pembiayaan dan investasi

- a. Pembiayaan Investasi Berjangka
- b. Take Out Financing
- c. Mezzanine Loan
- d. Pembiayaan Modal Kerja
- e. Promoter Financing
- f. Investasi Penyertaan Modal
- g. Pembiayaan Talangan
- h. Pembiayaan Subordinasi

Sektor-sektor yang dapat dibiayai oleh PT SMI:

- a. Jalan Tol dan Jembatan
- b. Transportasi
- c. Minyak dan Gas
- d. Telekomunikasi
- e. Pengolahan Limbah
- f. Kelistrikan
- g. Irigasi
- h. Air Minum
- i. Infrastruktur Sosial
- j. Efisiensi Energi
- k. Rolling stock kereta api

6.13.9 PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero)

Meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah, mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur nasional melalui dukungan kebijakan, instrument dan kerangka fiskal pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009 Pemerintah Indonesia telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Penjaminan PT PII dimaksudkan untuk menjamin risiko politik dari pemerintah baik pusat dan daerah selaku penanggung jawab proyek kerjasama untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi. Keberadaan penjaminan PT PII dapat meningkatkan kepastian partisipasi dan pembiayaan swasta bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

PT PII juga bekerjasama dengan lembaga multilateral internasional untuk meningkatkan kapasitas penjaminan untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur nasional berskala besar.

Sebagai dasar pelaksanaan KPBU, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU). Penerapan KPBU dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, dan menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

Adapun dalam kaitannya Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memprakarsai penyediaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha melalui skema KPBU.

PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dibentuk sebagai salah satu upaya Pemerintah mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, melalui penyediaan jaminan yang dilakukan dengan proses yang akuntabel, transparan dan kredibel. Disamping itu, kehadiran PII sebagai BUPI diharapkan akan mendorong masuknya pendanaan dari swasta untuk sektor infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek KPBU yang dapat berdampak pada penurunan cost of fund dari proyek-proyek infrastruktur.

Bagi pemerintah selaku pemilik proyek, manfaat penjaminan adalah dapat meningkatkan kepastian partisipasi dan pembiayaan swasta bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. PT PII juga dapat mendampingi pemerintah melalui pembentukan struktur transaksi yang baik sehingga meningkatkan kepastian keberhasilan transaksi dengan pihak investor yang berujung pada kepastian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan efisien.

Bagi swasta, penjaminan juga dapat mengurangi eksposur risiko politik dimata investor dan kreditor sehingga dapat berdampak pada penurunan biaya pembiayaan yang harus ditanggung untuk investasi proyek infrastruktur tersebut.

PT PII sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) juga membantu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam hal memagari (ring-fence) kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung ('sudden shock') kepada APBN atas proyek-proyek infrastruktur pemerintah sesuai peraturan perundangan terkait.

Secara ringkas, tujuan pembentukan PII adalah untuk:

- a. Meningkatkan kelayakan kredit dan kualitas proyek-proyek infrastruktur KPBU melalui kerangka evaluasi dan pengelolaan klaim atas penjaminan.
- b. Meningkatkan tata kelola dan transparansi pelaksanaan penyediaan penjaminan.
- c. Memfasilitasi serta mendorong keberhasilan transaksi bagi PJKP (Kementerian, BUMN, Pemda) dengan penyediaan penjaminan untuk proyek KPBU yang baik.
- d. Memagari (ring-fence) kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meminimalisir kejutan langsung ('sudden shock') kepada APBN.
- e. PII bertindak sebagai Penjamin bagi sektor swasta atas berbagai risiko infrastruktur yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan Pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi proyek KPBU infrastruktur, seperti keterlambatan pengurusan perijinan, lisensi, perubahan peraturan perundangan-undangan, ketiadaan penyesuaian tarif, kegagalan pengintegrasian jaringan/fasilitas dan risiko-risiko lainnya yang ditanggung atau dialokasikan ke pemerintah dalam masing-masing kontrak KPBU.

Penjaminan yang diberikan oleh PT PII diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Negara

- a. Mendukung pembangunan ekonomi melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang berkualitas;
- b. Mengurangi biaya infrastruktur dengan beban bunga pinjaman yang lebih rendah, untuk menekan tarif yang dibayarkan masyarakat.
- c. Melindungi Pemerintah dari klaim yang tak terduga dan risiko terhadap kewajiban finansial proyek infrastruktur yang timbul dari penjaminan yang diberikan;
- d. Mendorong atau menstimulasi langkah Pemerintah selanjutnya dalam implementasi KPBU.

2. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

- a. Menarik minat swasta dan lembaga keuangan dalam berpartisipasi dalam proyek KPBU sehingga tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek lebih tinggi dan sesuai jadwal.
- b. Meningkatkan kompetisi dalam proses tender untuk mendapatkan penawaran berkualitas dan harga yang kompetitif.

3. Sektor Swasta

- a. Mengurangi atau mitigasi risiko yang sulit ditangani oleh sektor swasta.
- b. Meningkatkan transparansi, kejelasan, dan kepastian dalam proses penyediaan penjaminan.
- c. Meningkatkan bankability dari proyek.
- d. Memperpanjang jangka waktu pinjaman yang dapat berpengaruh pada penawaran harga (bid) yang lebih kompetitif.
- e. Mendorong Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk membuat kontrak sesuai praktek terbaik yang berlaku umum dan memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kerjasama.